

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**DWIFUNGSI ABRI: LEGALISASI KEKUASAAN GOLONGAN MILITER
DALAM PEMERINTAHAN ORDE BARU**

MAKALAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Andreas Lantik

(081314053)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2014

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**DWIFUNGSI ABRI: LEGALISASI KEKUASAAN GOLONGAN MILITER
DALAM PEMERINTAHAN ORDE BARU**

MAKALAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Andreas Lantik

(081314053)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2014

MAKALAH

DWIFUNGSI ABRI : LEGALISASI KEKUASAAN GOLONGAN
MILITER DALAM PEMERINTAHAN ORDE BARU

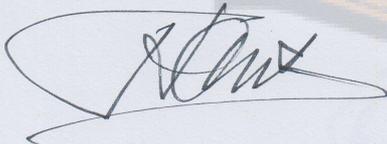
Oleh:

Andreas Lantik

NIM: 081314053

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing



Drs. A.K. Wiharyanto, M.M

Tanggal 21 Februari 2014

MAKALAH
DWIFUNGSI ABRI : LEGALISASI KEKUASAAN GOLONGAN
MILITER DALAM PEMERINTAHAN ORDE BARU

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Andreas Lantik

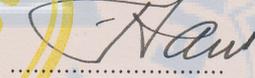
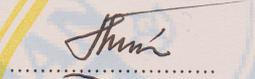
NIM: 081314053

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 26 Agustus 2014

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

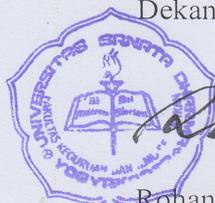
	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Indra Darmawan S.E., M.Si.	
Sekretaris	: Dra. Theresia Sumini, M. Pd.	
Anggota	: Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.	
Anggota	: Dra. Theresia Sumini, M. Pd.	

Yogyakarta, 26 Agustus 2014

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma.

Dekan,

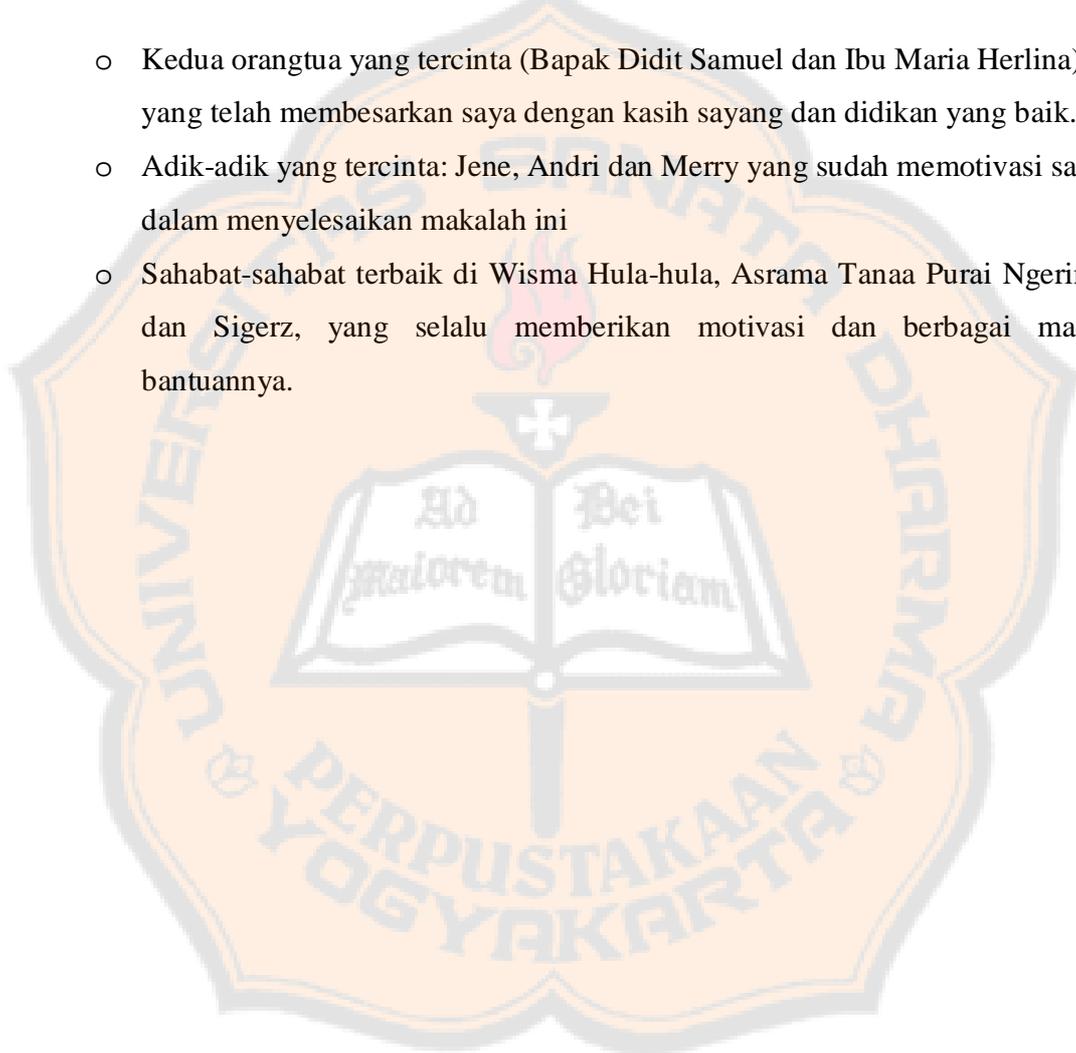


Rohandi, Ph. D.

PERSEMBAHAN

Makalah ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orangtua yang tercinta (Bapak Didit Samuel dan Ibu Maria Herlina), yang telah membesarkan saya dengan kasih sayang dan didikan yang baik.
- Adik-adik yang tercinta: Jene, Andri dan Merry yang sudah memotivasi saya dalam menyelesaikan makalah ini
- Sahabat-sahabat terbaik di Wisma Hula-hula, Asrama Tanaa Purai Ngeriman dan Sigerz, yang selalu memberikan motivasi dan berbagai macam bantuannya.



MOTTO

“Your proud will be your downfall”

(Oleh: *Mithrandir The Grey a.k.a Gandalf, The Hobbit*)

“No sacrifice, no victory”

(Oleh: *Archibald Witcwick, Transformer The Movie*)



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

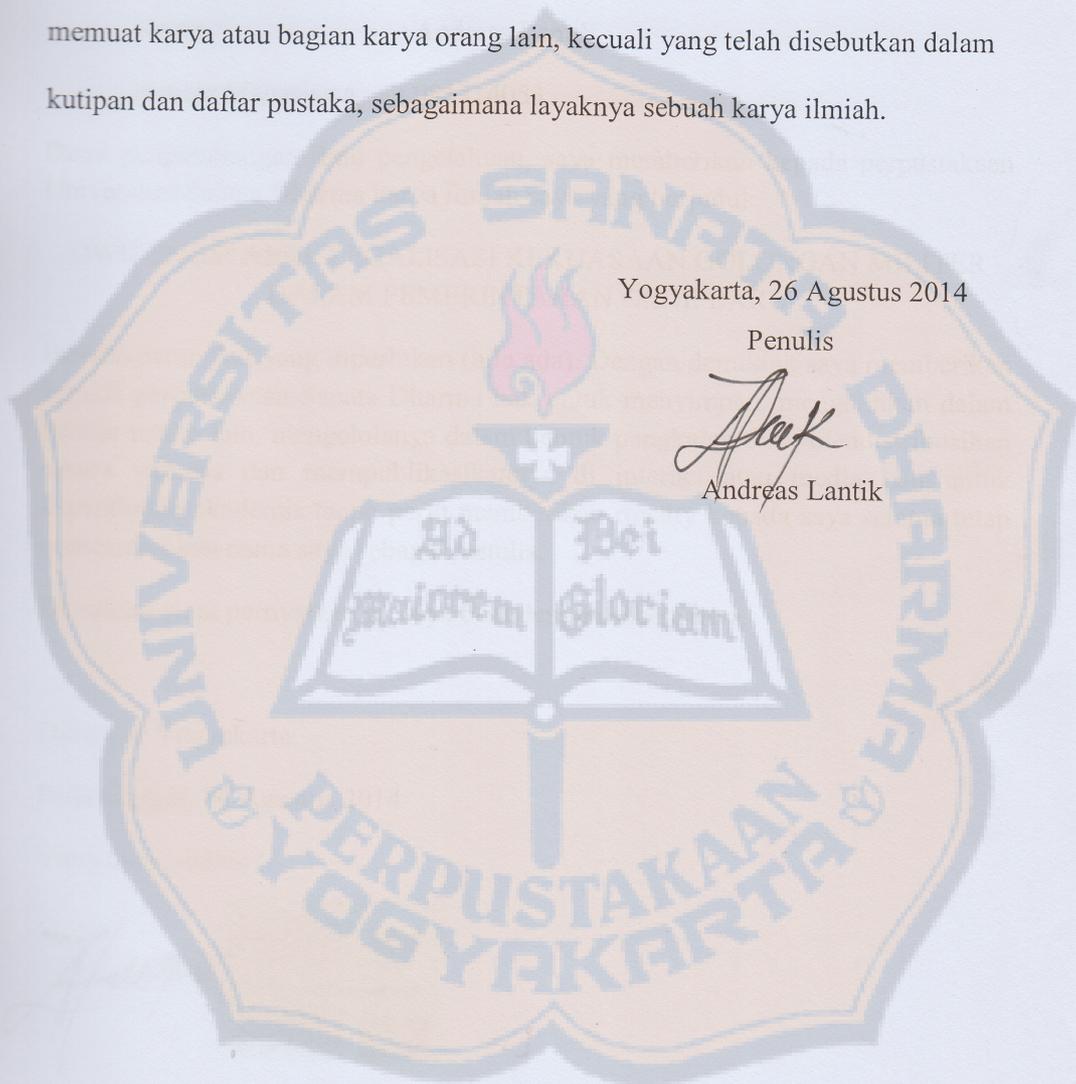
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa makalah yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya sebuah karya ilmiah.

Yogyakarta, 26 Agustus 2014

Penulis



Andreas Lantik



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma

Nama : Andreas Lantik

Nomor Mahasiswa : 081314053

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

**DWIFUNGSI ABRI: LEGALISASI KEKUASAAN GOLONGAN MILITER
DALAM PEMERINTAHAN ORDE BARU**

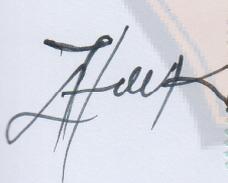
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada perpustakaan Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal, 26 Agustus 2014

Yang menyatakan :

Andreas Lantik

ABSTRAK

**DWIFUNGSI ABRI : LEGALISASI KEKUASAAN GOLONGAN MILITER
DALAM PEMERINTAHAN ORDE BARU**

Andreas Lantik
Universitas Sanata Dharma
2014

Penulisan makalah ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis: (1) proses munculnya Dwifungsi ABRI, (2) pelaksanaan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru, dan (3) dampak pelaksanaan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah dengan empat langkah yang mencakup: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan adalah pendekatan politik. Penulisan makalah ini bersifat deskriptif analitis.

Hasil penulisan menunjukkan: (1) Dwifungsi ABRI telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia dan terus berlangsung hingga masa Orde Baru. (2) Pelaksanaan Dwifungsi ABRI menempatkan golongan militer menjadi alat pendukung bagi pemerintah Orde Baru dalam mendominasi kekuatan politik dan ekonomi. (3) Dampak pelaksanaan Dwifungsi ABRI antara lain: Dalam bidang sosial mengakibatkan maraknya korupsi; bidang politik pembatasan ruang gerak bagi partai-partai politik yang oposisi; dan bidang ekonomi sumber-sumber utama pendapatan negara seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijadikan sebagai “donatur” untuk pembiayaan kepentingan angkatan bersenjata maupun pribadi para petinggi militer yang mengakibatkan persaingan tidak sehat di kalangan perwira.

ABSTRACT

***DWIFUNGSI ABRI: LEGALIZATION POWERS OF MILITARY GROUPS IN
NEW ORDER GOVERNMENT***

Andreas Lantik
Sanata Dharma University
2014

The purpose of this thesis is to describe and analyze : 1.) The process of the emergence of *Dwifungsi ABRI*; 2.) The role of the military in the New Order; and 3.) The impact of *Dwifungsi ABRI* implementation in The New Order.

The method that is used in this thesis is historical method consisting of four steps which are: heuristic, sources critical, interpretation and historiography. The approach that is used in this thesis is a political approach. This is an analytic-descriptive thesis.

The results show that : 1.) The *Dwifungsi ABRI* has started since the beginning of the independence of the Republic of Indonesia and continued until the New Order; 2.) The implementation of *Dwifungsi ABRI* put the military to become a tool for support the New Order government in dominating political and economic power; 3.) The impact of the implementation of *Dwifungsi ABRI* is follows: In the social field it resulted in rampant corruption; in the political field, absence of restrictions on movement for political parties of opposition. and economic major sources such as State-owned Enterprises/*BUMN* served as "donors" for financing the interest of the armed forces and private military leaders that become the cause of unfair competition among officers.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa, atas semua berkat dan rahmat yang dilimpahkan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan penulisan makalah yang berjudul “Dwifungsi ABRI : Legalisasi Kekuasaan Golongan Militer Dalam Pemerintahan Orde Baru”.

Makalah ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah.

Di dalam penulisan makalah ini, penulis merasa bahwa penulisan ini tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada campur tangan oleh pihak-pihak yang telah memberi bantuan. Oleh karena itu penulis dengan rasa bangga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Sanata Dharma.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma, yang telah memberi izin untuk menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk makalah ini.
4. Ibu Dra. Theresia Sumini, M. Pd. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah sabar untuk membimbing dan memberi masukan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Sanata Dharma.
5. Bapak Drs. A. K. Wiharyanto, M. M, selaku pembimbing dalam penulisan makalah ini yang telah dengan sabar membimbing serta memberi masukan kepada penulis untuk penulisan makalah ini.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah mendidik penulis selama menimba ilmu di Universitas Sanata Dharma.
7. Bapak Gon yang telah turut mendukung dan membantu penulis dalam merampungkan proses penulisan tugas akhir ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8. Krispina Dessi yang telah menjadi sahabat spesial dan pemberi semangat kerja bagi penulis.
9. Karyawan sekretariat dan perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang telah dengan sabar melayani penulis pada saat menggunakan fasilitas perpustakaan yang menunjang penyelesaian makalah ini.
10. Sahabat penulis di Prodi Pendidikan Sejarah (Stev, Windu, Yudha, Gio, Heri dan Seluruh teman-teman Angkatan 2008) atas kebersamaanya dan keakraban selama ini yang pernah terjalin.

Penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna dan berharap makalah ini bisa bermanfaat dan membantu semua pihak yang ingin mempelajari sejarah Dwifungsi ABRI : Legalisasi Kekuasaan Golongan Militer Dalam Pemerintahan Orde Baru.

Yogyakarta, 26 Agustus 2014


Andreas Lantik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRACT	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II PROSES MUNCULNYA DWIFUNGSI ABRI	8
A. Asal Mula Keterlibatan Militer Dalam Politik	8
B. Faktor – faktor Pendorong Munculnya Dwifungsi ABRI	11
1. Kondisi Sosial Politik Bangsa Indonesia Diawal Kemerdekaan	12
2. Usaha ABRI Dalam Menjalankan Peranan dan Fungsi Kekaryaannya	13
C. Dwifungsi ABRI yang Berkekuatan Hukum	16

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

D. Cikal Bakal Kolaborasi Orde Baru dengan Kalangan Militer Melalui Dwifungsi ABRI	20
---	----

BAB III PELAKSANAAN DWIFUNGSI ABRI PADA MASA ORDE

BARU	23
A. Latar Belakang Kedekatan Golongan Militer dengan Pemerintah Orde Baru	23
B. Golongan Militer Sebagai Pendukung Kekuatan Politik Pemerintah Orde Baru	26
C. Golongan Militer Sebagai Pendukung Kekuatan Ekonomi Pemerintah Orde Baru	28
D. Dominasi Kekuasaan Golongan Militer dalam Struktur Pemerintahan Orde Baru	31

BAB IV DAMPAK PELAKSANAAN DWIFUNGSI ABRI PADA MASA ORDE BARU

A. Dampak Dalam Bidang Sosial-Politik	38
1. “Pengebirian Terhadap Partai-partai Politik Saingan Pemerintah Orde Baru	38
2. Pembentukan Partai Golkar oleh Golongan Militer	42
3. Korupsi di Kalangan Pejabat Militer	45
B. Dampak Dalam Bidang Ekonomi	49
1. Eksploitasi Sektor Ekonomi Untuk kepentingan Pembiayaan Angkatan Bersenjata	50
2. Eksploitasi Sektor Ekonomi Untuk Kepentingan Pribadi Para Perwira	54
C. Dampak Dalam Bidang Militer: Terjadinya Persaingan dalam Tubuh Militer	59

BAB V KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Tabel 1. Jumlah anggota ABRI yang ditempatkan diluar bidang Hankam
2. Silabus
3. RPP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sebuah hasil dari perjuangan yang sangat panjang dari bangsa Indonesia. Keberhasilan dalam memperoleh kemerdekaan tersebut bukan berarti bahwa perjuangan akan berakhir begitu saja, tetapi merupakan sebuah awal bagi perjuangan baru, yakni mempertahankan kemerdekaan tersebut.

Dalam usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja terbentuk, maka pemerintah saat itu mulai membahas persoalan tersebut pada tanggal 19 Agustus 1945 dan kemudian memutuskan untuk segera membentuk tentara kebangsaan.¹ Namun keputusan tersebut urung untuk segera dilaksanakan karena para pemimpin generasi tua khawatir terhadap ancaman kekuatan militer Sekutu yang pada masa itu telah memerintahkan Jepang untuk mempertahankan *status quo* di daerah-daerah yang didudukinya, termasuk Indonesia. Sebagai gantinya, maka pemerintah memutuskan untuk membentuk tiga badan, yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerah masing-masing.²

Munculnya BKR sebagai badan yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban bagi Republik yang baru saja merdeka, merupakan cikal bakal bagi

¹ Nugroho Notosusanto, *Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan implementasi Dwifungsi ABRI*, Jakarta, Sinar Harapan, 1985, hal. 37

² *Idem*

lahirnya sebuah tentara yang bersifat reguler bagi Indonesia. Proses lahirnya tentara reguler didorong oleh situasi yang memang sangat mendesak pada masa itu. Kebutuhan akan tentara nasional semakin disadari oleh pemerintah ketika situasi keamanan dalam negeri yang semakin bertambah gawat karena kedatangan bangsa sekutu yang dibonceng NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) menimbulkan banyak perlawanan dan memunculkan banyak korban dari pihak rakyat. Karena tidak adanya sebuah kesatuan komando yang kompak.³ Sebagai tindak lanjut dari kondisi tersebut, maka pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dengan Urip Sumohardjo sebagai kepala stafnya.⁴ Dengan terbentuknya TKR, maka BKR, PETA, KNIL, Heiho, dan lasykar-lasykar lainnya akan segera disatukan dibawah panji TKR melalui sebuah perintah yang dikeluarkan oleh KNIP.⁵

Untuk mendukung terciptanya sebuah organisasi militer yang sempurna dan mampu menyatukan berbagai badan dan kesatuan dalam satu kesatuan, maka pada tanggal 7 Juni 1947 Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden yang salah satu isinya adalah mensahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 3 Juni 1947 dan dinyatakan bahwa semua laskar serta badan perjuangan secara serentak dimasukkan ke dalam TNI. Dengan demikian berakhirilah proses pertumbuhan TKR menjadi TNI yang untuk selanjutnya merupakan satu-satunya wadah bagi pejuang-pejuang bersenjata 1945.

³ *Ibid*, hal. 40

⁴ Muhammad Rusli Karim, *Peranan ABRI dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik Indonesia*, Jakarta, Haji Masagung, 1989, hal. 23

⁵ Jahja Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta, Fak. Sospol UGM, 1973, hal.31

Pengakuan yang sah terhadap eksistensi kelompok pejuang bersenjata 1945 dalam wadah TNI membuat posisi golongan militer secara otomatis menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia. Menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan karena fungsinya sebagai alat negara untuk menjamin kestabilan pertahanan dan keamanan (Hankam). Dengan fungsi dan peran yang sedemikian rupa, maka golongan militer mendapat pelbagai macam keuntungan seperti diikutsertakan langsung ke dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Keuntungan yang dirasakan oleh kalangan militer ini adalah kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Keikutsertaan kalangan militer dalam pemerintahan demokrasi yang seharusnya dikendalikan oleh golongan sipil sesungguhnya bukanlah hal yang baru bagi kalangan militer itu sendiri. Hal yang sama pernah terjadi ketika di awal kemerdekaan ketika para pemimpin BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang seharusnya hanya bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban umum juga turut merangkap jabatan menjadi anggota KNI (Komite Nasional Indonesia) yang menangani masalah-masalah politik, ekonomi dan sosial-budaya, dimana seharusnya posisi tersebut merupakan tanggung jawab kalangan sipil meskipun pada masa itu BKR bukanlah tentara yang bersifat reguler dan situasi itu tercipta sebagai akibat desakan revolusi itu sendiri.⁶

Rekam jejak keterlibatan golongan militer dalam sistem pemerintahan memang sudah ada sejak lama bahkan sebelum militer itu sendiri secara resmi terbentuk. Kondisi yang demikian terus berlanjut sejak masa pemerintahan Orde

⁶ Nugroho Notosusanto, *op.cit*, hal. 38

Lama pimpinan Presiden Sukarno hingga masa Orde Baru pimpinan Presiden Suharto. Proses melibatkan diri yang dilakukan oleh kalangan militer ke dalam pemerintahan cenderung berbeda di setiap masanya. Pada masa Presiden Sukarno, golongan militer hanya memanfaatkan kedekatan personal antara para pemimpinya dengan sang Presiden untuk memperoleh jabatan-jabatan sipil yang bersifat vital jika ditilik secara kepentingannya, sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Suharto, golongan militer bahkan lebih berani dalam melibatkan dirinya ke bidang politik dengan mempopulerkan Dwifungsi ABRI⁷ (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) sebagai acuan utamanya dalam meleburkan diri ke dalam sistem pemerintahan.

Dalam usahanya untuk mendapat kesempatan terlibat langsung dalam bidang politik, pihak militer melakukan berbagai macam pembenaran atas doktrin Dwifungsi ABRI-nya tersebut, beberapa di antaranya didasarkan kepada pembukaan UUD 1945, sehingga militer merasa diamanatkan secara langsung oleh konstitusi untuk ikut serta dalam penyelenggaraan negara dengan cara terjun langsung ke dalam politik tanpa mengabaikan tugas-tugas Hankamnya. Sebagai perwujudan usaha untuk mengesahkan dan melegalkan keterlibatan militer ke dalam perpolitikan nasional, maka tidak mungkin juga terlepas dari “bantuan” yang diberikan oleh MPR yang kebetulan sempat “dikuasai” oleh seorang petinggi militer dalam mengeluarkan Keppres yang mengatur peran militer dalam politik. Dengan demikian maka Dwifungsi ABRI bisa dimanfaatkan sebagai alat oleh

⁷ Merupakan doktrin yang membenarkan keterlibatan militer dalam bidang politik

golongan militer untuk menduduki jabatan-jabatan sipil di luar fungsinya sebagai tentara yang membidangi urusan pertahanan dan keamanan semata.⁸

Kehadiran golongan militer ke dalam pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Suharto membuat peranan ABRI dalam bidang politik semakin hari semakin dominan dan di saat yang bersamaan juga mengurangi independensi ABRI dalam usahanya menjalankan peran sebagai agen penyeimbang diantara persaingan politik dengan kalangan sipil. Kondisi tersebut secara perlahan-lahan mengalahkan semangat awal golongan militer yang terkandung dalam semboyan “ABRI dari, oleh dan untuk rakyat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi obyek penulisan makalah ini, yaitu :

1. Bagaimana proses munculnya Dwifungsi ABRI ?
2. Bagaimana pelaksanaan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis proses munculnya Dwifungsi ABRI.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis peranan dari golongan militer dalam sistem pemerintahan Orde Baru dengan adanya Dwifungsi ABRI.

⁸ Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1986, hal.272

c. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak pelaksanaan Dwifungsi ABRI dalam pemerintahan Orde Baru.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat Penulisan ini adalah :

a. Bagi Universitas Sanata Dharma

Selain untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma perguruan tinggi, khususnya bidang penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial, makalah ini diharapkan dapat memberikan kekayaan khasanah yang berguna bagi pembaca dan pemerhati sejarah di lingkungan Universitas Sanata Dharma.

b. Bagi Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Penulisan makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sejarah kolaborasi antara golongan militer dan pemerintah di Indonesia pada masa Orde Baru yang di jembatani oleh Dwifungsi ABRI dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pelengkap dalam pembelajaran sejarah.

c. Bagi Pembaca

Makalah ini diharapkan mampu menarik minat pembaca untuk mempelajari tentang sejarah militer di Indonesia khususnya pada masa Orde Baru, di mana relasi antara militer dengan pemerintahan adalah sebagai mitra yang sangat dekat. Sehingga dengan demikian makalah ini dapat membantu memberikan pencerahan dan wawasan yang baru bagi para pembaca terkait sekelumit sepak terjang golongan militer maupun berbagai macam dampak yang dihasilkannya pada masa Orde Baru maupun yang masih bisa dirasakan dan ditemukan hingga pada masa Reformasi saat ini.

D. Sistematika Penulisan

Makalah yang berjudul “Dwifungsi ABRI: Legalisasi Kekuasaan Golongan Militer Dalam Pemerintahan Orde Baru” memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I: Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II: Berisi uraian tentang proses munculnya Dwifungsi ABRI yang didorong oleh adanya keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi kekaryaan yang dimiliki oleh golongan militer dalam berbagai macam bidang khususnya bidang sosial-politik.

Bab III: Berisi uraian tentang peranan militer mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan, sehingga akan membuat posisi ABRI sendiri sebagai mitra langsung bagi pemerintah Orde Baru dalam bidang sosial-politik dan ekonomi.

Bab IV: Berisi uraian yang menjelaskan dampak keterlibatan militer melalui Dwifungsi ABRI dalam bidang sosial-politik, militer dan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru.

Bab V: Berisi kesimpulan

BAB II

PROSES MUNCULNYA DWIFUNGSI ABRI

A. Asal Mula Keterlibatan Militer Dalam Politik

Persepsi golongan militer mengenai dirinya sebagai kekuatan politik berasal dari perbedaan yang kabur tentang fungsi militer dan fungsi politik dalam masa perang melawan Belanda. Sifat perjuangan itu sendiri memiliki sifat politik sekaligus juga militer. Para pemuda yang pada waktu itu mengangkat senjata melawan Belanda tidak didorong oleh keinginan untuk membina karir dalam kehidupan militer, tetapi oleh semangat patriotik yang dinyatakan terhadap republik yang telah diproklamasikan oleh para politisi dari kalangan nasionalis. Watak perjuangan tersebut selanjutnya telah memperkuat kecenderungan golongan militer ke soal-soal politik.

Tanpa bekal suatu latihan kemiliteran serta kurangnya persenjataan modern, perlawanan Indonesia terhadap Belanda berlangsung dalam bentuk perang gerilya, di mana perbedaan kehidupan antara militer dan sipil menjadi tidak jelas, lagipula para pejuang bergantung sepenuhnya kepada penduduk setempat. Situasi yang mengharuskan para pejuang gerilya diorganisasi ke dalam satuan-satuan pengelompokan politik yang tidak regular, sebagaimana mestinya suatu angkatan bersenjata yang regular, di lain sisi para pejuang pun sangat membutuhkan dukungan rakyat terhadap perjuangan mereka, maka para pemimpin militer pun melaksanakan fungsi-fungsi politik di tengah keadaan semacam itu. Dalam banyak hal, karenanya, peranan-peranan politik dari para pemimpin politik dan tentara hampir tak dapat dibedakan.

Tiada tradisi yang apolitis di kalangan tentara lebih memudahkan para pemimpin tentara memainkan peran-peran mereka semacam revolusi. Kebutuhan yang mendesak dari republik yang masih muda untuk memobilisasi rakyat sebagai kekuatan perjuangan, menyebabkan tidak adanya kesempatan untuk menumbuhkan secara bertahap “profesionalisme tentara” di kalangan para perwira muda bekas tentara penjajah Belanda yang telah memihak kaum nasionalis.¹ Sekelompok kecil perwira tentara nasional yang baru, yang pernah mendapat pendidikan akademis, telah disesaki oleh sejumlah besar pemuda yang hanya memperoleh latihan kemiliteran sekedarnya saja dalam organisasi-organisasi kemiliteran cadangan (khususnya Pembela Tanah Air atau Peta) yang didirikan oleh balatentara Jepang di masa pendudukan, atau mereka yang mengangkat senjata dalam laskar-laskar setempat atau kelompok-kelompok tidak tetap yang terbentuk secara spontan di segenap pelosok negeri, dalam bulan-bulan setelah proklamasi kemerdekaan.²

Kondisi yang berbeda dengan para akademisi lulusan Belanda yang bertolak dari paham Barat yang mengindoktrinasi agar tentara bersikap netral dalam politik, para pemimpin militer nonprofesional yang dilatih oleh Jepang menganggap tidak perlu merasa enggan untuk terlibat dalam dunia politik, sementara para pemuda yang memasuki kesatuan-kesatuan laskar sering pula menjadi anggota-anggota salah satu organisasi politik atau organisasi yang lain. Dengan demikian terdapat pemimpin-pemimpin korps termasuk beberapa komandan yang berpandangan bahwa angkatan bersenjata adalah alat negara yang

¹ Kalangan yang dimotori oleh Ir Sukarno, M. Hatta, dll, yang memiliki garis perjuangan di jalur diplomasi

² Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1986, hal.22

bersifat non-politik, sementara banyak pula yang merasa siap menerjunkan diri ke gelanggang perpolitikan.

Keadaan lingkungan tempat para komandan tentara mendapatkan orientasi politik selama masa perang revolusi, telah memberikan kesadaran kepada mereka tentang kepentingan-kepentingan politik mereka sendiri yang bisa saja berbeda dengan kepentingan politisi sipil di kalangan pemerintah. Situasi kemiliteran sewaktu mereka terlibat dalam perjuangan kemerdekaan mau tak mau menyebabkan kepemimpinan militer terlibat langsung dalam permasalahan politik nasional, di mana pandangan-pandangan mereka sering berbeda dengan pandangan pemerintah.

Pimpinan pemerintahan yang telah terjun ke dalam pergerakan nasional sejak 1920-an dan 1930-an kebanyakan berasal dari kalangan urban. Mereka adalah kelompok elite yang sempat mengenyam pendidikan Belanda, sedangkan para komandan tentara senior sangat jarang berumur lebih dari 30 tahun dan biasanya berasal dari kota-kota kecil di Jawa, hanya mengenal dan bahkan dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang sifatnya masih sangat tradisional dan berpendidikan rendah (dari sekolah pribumi) serta hanya sedikit yang menguasai bahasa Belanda. Kurangnya hubungan yang disebabkan oleh kesenjangan generasional dan kultural ini lebih diperburuk lagi oleh perasaan yang wajar dalam kalangan para perwira lapangan, bahwa mereka pun memiliki hak yang sama seperti golongan politisi sipil dalam pemerintahan untuk menentukan bagaimana perjuangan harus dilaksanakan.

Setelah memilih panglima besar sendiri pada tahun 1945, para pemimpin militer terjun pula ke dalam berbagai kelompok politik untuk menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kesediaan pemerintah memberikan konsesi-konsesi kepada Belanda untuk mengadakan perundingan. Pemimpin-pemimpin pemerintah menganggap bahwa perjuangan mempunyai ruang lingkup internasional yang lebih luas dan arena itu cenderung mencurahkan usaha lebih banyak kepada perjuangan yang bersifat diplomatic, yang dilain pihak dianggap sebagai sebuah penghianatan oleh pejuang-pejuang gerilya yang telah bersedia mengambil resiko kehilangan nyawa mereka demi tercapainya kemenangan total. Menjauhnya para komandan militer dari pihak pemerintah mencapai puncaknya ketika mereka harus tetap bertempur sementara para pemimpin politik menyerahkan diri kepada Belanda pada bulan Desember 1948. Beberapa perundingan baru dilaksanakan di tahun 1949 diterima dengan kecurigaan yang besar oleh para perwira kalangan militer yang kemudian hamper saja menolak gencatan senjata yang diumumkan oleh pemerintah; mereka merasa dilecehkan oleh ungkapan-ungkapan yang tertera dalam penyerahan kedaulatan tahun 1949. Demikianlah, di akhir masa revolusi terdapat banyak komandan militer yang sesungguhnya tidak lagi mempercayai politisi sipil di kalangan pemerintah.³

B. Faktor-Faktor Pendorong Munculnya Dwifungsi ABRI

Munculnya pihak militer dalam percaturan politik nasional dengan gemanya dwifungsinya tidak terlepas dari berbagai faktor yang turut menyertainya. Adapun faktor-faktor tersebut terbagi dalam dua jenis yaitu faktor yang bersifat eksternal

³ Harold Crouch, *op.cit*, hal.24

yang berupa kondisi sosial politik Indonesia pada masa itu dan faktor yang bersifat internal yang terkait langsung dengan peranan ABRI sendiri dalam usahanya menjalankan fungsi kekaryaan.

1. Kondisi Sosial Politik Bangsa Indonesia diawal Kemerdekaan

Sebagai sebuah negara yang baru saja mencapai kemerdekaan dan sedang membangun diri, Indonesia pada umumnya belum memiliki institusi politik yang sehat dan efektif. Jumlah kaum intelektual dan politisi sangat sedikit dan belum berpengalaman. Kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat belum berlangsung dengan baik. Rakyat mudah diagitasi dan diadu-domba, sehingga sering timbul kerawanan politik. Dalam taraf perkembangan berikutnya terjadi proses politisasi pada kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pengaruh sistem pendidikan dan komunikasi yang semakin intensif serta ekstensif, yang secara otomatis meningkatkan kesadaran politik rakyat serta meningkatkan tuntutan-tuntutan, partisipasi dan kontrol sosial rakyat.

Rakyat yang mulai melek huruf dan melek politik itu menuntut partisipasi politik yang lebih besar. Kaum intelektual, orang-orang kaya baru dari dunia bisnis dan dagang, kelompok-kelompok sosial dan militer, semua ikut ambil bagian dalam kegiatan politik. Masing-masing memakai metode perjuangan dan tujuan politik yang berbeda, sehingga terjadi proses politisasi pada kekuatan-kekuatan sosial dan militer; masing-masing dengan daya tarik sendiri. Maka tidak heran bahwa kehidupan politik masih belum sehat, disebabkan oleh sistem multipartai, terutama pada rentang waktu 1953-1959; bahkan sering terjadi kekacauan politik.⁴

⁴ Muhammad Rusli Karim, *Peranan ABRI dalam Politik*, Jakarta, CV Haji Masagung, 1989, hal.30

Ketidakstabilan politik yang dialami Indonesia pada era 1953-1959 menyebabkan tidak kurang dari 17 kabinet jatuh bangun dan nyaris setiap tahun terjadi pergantian Dewan Menteri⁵ sebagai akibat dominasi kekuasaan legislative dengan semboyannya “politik adalah raja”. Partai-partai politik dan organisasi-organisasi sosial yang terasosiasi secara politik merupakan kekuatan-kekuatan yang terpecah-belah dan tidak pernah bisa rukun. Kepentingan sosial dan golongan sendiri lebih diutamakan daripada memperjuangkan kepentingan umum (kepentingan bangsa dan negara). Etos perjuangan yang pada masa perang kemerdekaan penuh pengabdian tanpa pamrih mulai mengalami erosi; bergeser menjadi semangat mencari kekayaan dan kekuasaan.

Keadaan politik yang sangat *instabil* membuat militer merasa perlu untuk menetralkan atau mengimbangkan perlembagaan politik dan pelurusan jalannya usaha pembangunan. Dalam usaha penstabilan kondisi sosial politik yang sedemikian kacau maka presiden Sukarno mulai menempatkan figur-figur militer/ABRI di badan-badan eksekutif, yudikatif, sosial dan politik sebagai *intervening agents* guna menetralkan atau mengimbangkan situasi sosial politik saat itu.⁶

2. Usaha ABRI dalam Menjalankan Peranan dan Fungsi Kekaryaannya

Pelaksanaan fungsi karya yang dimiliki oleh ABRI sesungguhnya cukup kompleks, karena bersinggungan langsung dengan sendi-sendi kehidupan

⁵ Dewan yang beranggotakan para menteri yang ditunjuk secara khusus oleh Presiden dengan tugas memberikan nasihat dan pertimbangan-pertimbangan.

⁶ Kartini Kartono, *ABRI dan Permasalahannya; Pemikiran Reflektif Peranan ABRI di Era Pembangunan*, Bandung, Mandar Maju, 1996, hal.3

berbangsa dan bernegara, adapun hal tersebut meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, kerohanian dan agama. Peranan yang yang diharapkan dari ABRI di bidang-bidang tersebut adalah peranan sebagai pelopor, penggerak dan pematap.⁷

Sebagai pedoman utama dalam menjalankan peranannya, ABRI selalu berpegang teguh pada doktrin-doktrinnya, yaitu Catur Darma Eka (Cadek) yang berisikan doktrin Hankamnas dan doktrin perjuangan ABRI (1966), dokumen realisasi pembangunan hankamnas dan kekaryaan ABRI (1967), doktrin Kekaryaan ABRI (1975) dan doktrin operasi sosial politik (1977). Doktrin operasi sosial politik (sospol) memberikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu di bidang sosial-politik. Pedoman itu kemudian dituangkan dalam asas-asas operasi sosial-politik.

Partisipasi ABRI dalam bidang politik juga tidak terlepas dari posisi dan kekuatan yang dimilikinya adalah sederajat dengan kekuatan sosial politik lainnya, karena pada dasarnya memiliki kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama. ABRI mendasarkan perjuangannya dibidang politik berdasarkan pengabdianya kepada bangsa dan Negara,⁸ dengan kata lain ABRI mengeneralisasi keterlibatan langsung yang dilakukannya dalam bidang politik sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan Negara.

Seperti yang telah dituliskan sebelumnya, dalam menjalankan tugas kekaryaan, ABRI berpedoman pada asas-asas yang telah digariskan dalam Doktrin kekaryaan. Dalam perkembangan selanjutnya, politik kekaryaan yang

⁷ *Ibid*, hal.13

⁸ Nugroho Notosusanto. *Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*, Jakarta, Sinar Harapan, 1985, hal . 273

dijalankan ABRI adalah identik dengan politik pemerintah, sedangkan strategi kekeranya nya juga disesuaikan dengan strategi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kekeryaan ABRI telah menggariskan perjuangan politiknya hanya untuk mensukseskan kebijaksanaan dan politik pemerintah yang dituangkan dalam program-program pemerintah. Dalam aturan pelaksanaan fungsi kekeryaannya, kepentingan ABRI secara keseluruhan harus tetap berada di dalam dan di bawah kepentingan nasional yang digariskan oleh pemerintah.

Pelaksanaan fungsi kekeryaan ABRI di bidang legislatif dan di bidang eksekutif sesungguhnya bertujuan untuk menjamin terlaksananya program pemerintah berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Di samping mengadakan pengamanan fisik yaitu mencegah segala kemungkinan dan menindak segala gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul, atau dengan kata lain disamping menjalankan tugas sebagai kekuatan hankam, maka ABRI sebagai kekuatan sosial dengan fungsi kekeryaan harus dapat melaksanakan pengamanan politis-psikologis bagi kebijakan pemerintah. Segala usaha dilakukan untuk menjamin tegaknya kewibawaan pemerintah. Dalam kacamata doktrin kekeryaan, segala masalah haruslah ditinjau berdasarkan pertimbangan dari segi kepentingan keamanan dan kesejahteraan nasional. Kegiatan-kegiatan yang menyangkut bidang kesejahteraan tidak boleh membahayakan Negara dan bangsa, sebaliknya tindakan-tindakan di bidang keamanan akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan rakyat. Kegiatan-kegiatan untuk mencapai stabilitas nasional harus juga memperlancar pembangunan nasional dan sebaliknya hasil pembangunan nasional (asas pendekatan keamanan dan pendekatan

kesejahteraan). Sedangkan dalam menghadapi masalah-masalah politik, ekonomi dan sosial budaya titik berat diletakkan pada pendekatan kesejahteraan tanpa mengabaikan segi keamanan.

Dalam menjalankan fungsi yang terkait dengan masalah kepemimpinan, kekaryaan ABRI juga menitik beratkan pada usaha-usaha menanamkan keyakinan dengan cara-cara yang demokratis dan pada hubungan yang bersifat tidak resmi/informal serta mencegah sifat kepemimpinan yang otoriter. Kepemimpinan yang bersifat demikian menurut kekaryaan ABRI memerlukan jiwa dan kemampuan untuk menciptakan suasana saling mengerti, menghargai dan terciptanya loyalitas kerjasama dalam lingkungannya. Semua parameter yang tersebut berguna untuk mensesuaikan fungsi dan proses pengelolaan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan sosial, juga untuk menggerakkan dan mengarahkan segala daya demi tercapainya tujuan, berdasarkan kesatuan pimpinan dan pengendalian digunakan asas-asas kepemimpinan dan komunikasi sosial ABRI.

C. Dwifungsi ABRI Yang Berkekuatan Hukum

Dwifungsi ABRI memang muncul secara massif dan terang terangan pada masa pemerintahan Orde Baru namun secara praktek munculnya dwifungsi ABRI sesungguhnya sudah ada jauh sebelum masa pemerintahan Orde Baru, bahkan sudah dimulai sejak masa-masa awal kemerdekaan dan pembentukan tentara nasional. Praktik dwifungsi yang sudah sejak lama dijalankan dan bahkan dilakukan sejak “lahir” oleh golongan militer yang dalam hal ini dilakukan oleh ABRI menjadi semacam “kecanduan” untuk selalu terlibat dalam bidang-bidang

yang sesungguhnya telah dialokasikan untuk kalangan sipil. Ketergantungan yang dialami oleh kalangan militer ini kemudian menimbulkan semacam anggapan bahwa dalam hal-hal tertentu mereka tidak mempercayai kemampuan kalangan sipil untuk menjalankan tugasnya. Bukti nyata ketidaksediaan pihak militer untuk menyerahkan sepenuhnya kepada sipil terkait jabatan-jabatan/fungsi-fungsi tertentu yang memang seharusnya telah menjadi hak kalangan sipil terlihat jelas dalam Doktrin Kekaryaan yang telah dicetuskan oleh ABRI, di mana dengan berpegang kepada peranannya sebagai pelopor, penggerak dan pematap dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, pihak militer kembali menegaskan dalil-dalil pembenaran keterlibatannya dalam bidang politik. Dengan doktrin kekaryaan yang dimilikinya, pihak militer kemudian secara bertahap mengaplikasikan proses dwifungsinya dalam tubuh ABRI yang kemudian mampu membuatnya menjadi lebih dominan pada masa Orde Baru.

Apabila dilihat secara siklis, kemunculan dwifungsi ABRI yang “legal” pada masa Orde baru dapat dideskripsikan secara gamblang bahwa dwifungsi yang ada pada masa awal kemerdekaan melahirkan doktrin kekaryaan yang kemudian mampu mengakomodir kelahiran dwifungsi ABRI yang lebih berkekuatan hukum dan memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada yang sebelumnya.

Dalam menegaskan kedudukan dan peranannya dengan Dwifungsi, ABRI mengklaim bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan dasar-dasar yang terkandung dalam UUD 1945. Di mana menurut kalangan militer tempat kedudukan dan peranan ABRI dalam kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia merupakan

sebuah perwujudan yang bersifat sosiologis daripada proses perjuangan nasional yang telah mengamanatkan kepada ABRI bagi adanya Dwifungsi ABRI itu sendiri.⁹ Proses perwujudan historis-sosiologis daripada Dwifungsi ABRI dengan demikian mempunyai dasar hukum yang kuat, karena didukung oleh teori-teori dalam ilmu hukum maupun oleh UUD 1945 sendiri.

Dalam usahanya untuk lebih menguatkan dan membenarkan keterlibatan ABRI melalui Dwifungsinya, maka dapat ditelisik secara lebih mendalam lagi bagian-bagian mana saja yang terdapat dalam UUD 1945 dapat dijadikan sebagai titik tolak bagi kalangan militer untuk berpartisipasi dalam sistem pemerintahan. Bagian yang dimaksud oleh kalangan militer ini adalah penjelasan dari UUD 1945: a) pada penjelasan Umum angka IV ditetapkan bahwa “telah cukup jika UUD hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi”. b) penjelasan tentang sistem pemerintahan negara dalam hubungan dengan kedudukan DPR antara lain dijelaskan bahwa “haluan negara yang..ditetapkan oleh UUD atau MPR”. Secara singkat kedua cuplikan di atas hanya ditentukan bahwa konstitusi (hukum dasar) negara hanya memuat aturan-aturan pokok saja yang berisikan Garis-garis Besar Haluan Negara dan yang dapat ditemukan di tiga tempat, yaitu dalam UUD, dalam praktik kehidupan bernegara (konvensi), atau ditetapkan oleh ketetapan-ketetapan MPR.

Secara eksplisit apabila diteliti lebih jauh, memang tidak terlihat secara jelas bahwa di dalam batang tubuh UUD 1945 menyebut Dwifungsi ABRI, namun kembali lagi kalangan militer menegaskan bahwa dasar hukumnya harus dicari

⁹*Ibid*, hal. 222

dalam UUD 1945 secara menyeluruh. Dalam hal ini dasar hukum Dwifungsi ABRI terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dengan penjelasan dihubungkan dengan praktik penyelenggaraan negara dan ketetapan-ketetapan yang telah dikeluarkan oleh MPR, seperti: a) telah diketahui bahwa ide atau pemikiran tentang identitas dan Dwifungsi ABRI secara implisit didukung oleh UUD 1945. b) kenyataan bahwa sejak semula ABRI telah berdwifungsi, telah terwujud lama dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga oleh karenanya Dwifungsi secara eksplisit dilandasi oleh hukum dasar yang tidak tertulis. Dalam ketetapan-ketetapan MPR secara jelas mengakui eksistensi Dwifungsi ABRI adalah konstitusional. Ketetapan-ketetapan MPR yang dimaksud adalah TAP MPR(S) no.II/MPRS/1960, TAP MPR(S) no,XXIV/MPRS/1966 dihubungkan dengan no.XI/MPRS/1966 dan no.XLII/MPRS/1968 yang kemudian disempurnakan oleh TAP MPR no.IV/MPR/1973. Adapun TAP MPR yang terakhir kemudian diganti oleh no.IV/MPR/1978.¹⁰

Rekam jejak proses untuk mendapatkan kekuatan hukum bagi Dwifungsi ABRI terus berlanjut dari yang sebelumnya hanya berbentuk sebuah ketetapan MPR kemudian diatur dalam UU no.15 tahun 1969 tentang Pemilu yang telah diubah oleh UU no.4 tahun 1975 dan oleh UU no.2 tahun 1980, dan dalam UU no.16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang telah disempurnakan oleh UU no.5 tahun 1975. Perlu dicatat bahwa sebelumnya sudah ada 2 UU yang ikut mengatur Dwifungsi ABRI yaitu UU no.7 tahun 1957 tentang Dewan Nasional dan UU no.80 tahun 1958 tentang Dewan Perancang

¹⁰ *Ibid*, hal. 224

Nasional, akan tetapi kedua UU tersebut tidak berlaku lagi karena dewan tersebut bubar pada tahun 1959.¹¹ UU yang kemudian secara tegas dan secara pokok mengatur Dwifungsi ABRI baru hadir pada periode 1982 melalui UU no.20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara.¹²

D. Cikal Bakal Kolaborasi Orde Baru dengan Kalangan Militer Melalui Dwifungsi ABRI

Tidak dapat dipungkiri bahwa kelahiran Orde Baru turut disukseskan kekuatan golongan militer melalui senjata Dwifungsinya yang secara resmi menginfiltrasi salah satu lembaga negara yang memiliki kekuatan untuk memecat dan mengangkat pemimpin yang baru. Penyusupan yang dilakukan oleh golongan militer berkedok pembersihan unsur-unsur MPR dari pengaruh komunis merupakan awal dari kolaborasi Orde Baru dengan ABRI dan dwifungsinya.

Dominasi militer pada masa Orde Baru yang diawali dengan dijadikannya A.H Nasution yang merupakan seorang Jenderal Angkatan Darat sebagai ketua MPR yang memiliki wewenang untuk mengangkat atau memberhentikan presiden berdampak langsung pada kemudahan- kemudahan yang bisa dimanfaatkan oleh Jenderal Suharto untuk kemudian memperoleh jabatan sebagai Presiden dan merintis jalan bagi kehadiran sebuah “dinasti” pemerintahan yang baru. Dalam masa-masa awal era Orde baru, ABRI sudah mampu merumuskan posisi Dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan Kekuatan sosial yang harus kompak dan

¹¹ *Idem*

¹² *Idem*

bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal Pancasila dan UUD 1945.¹³

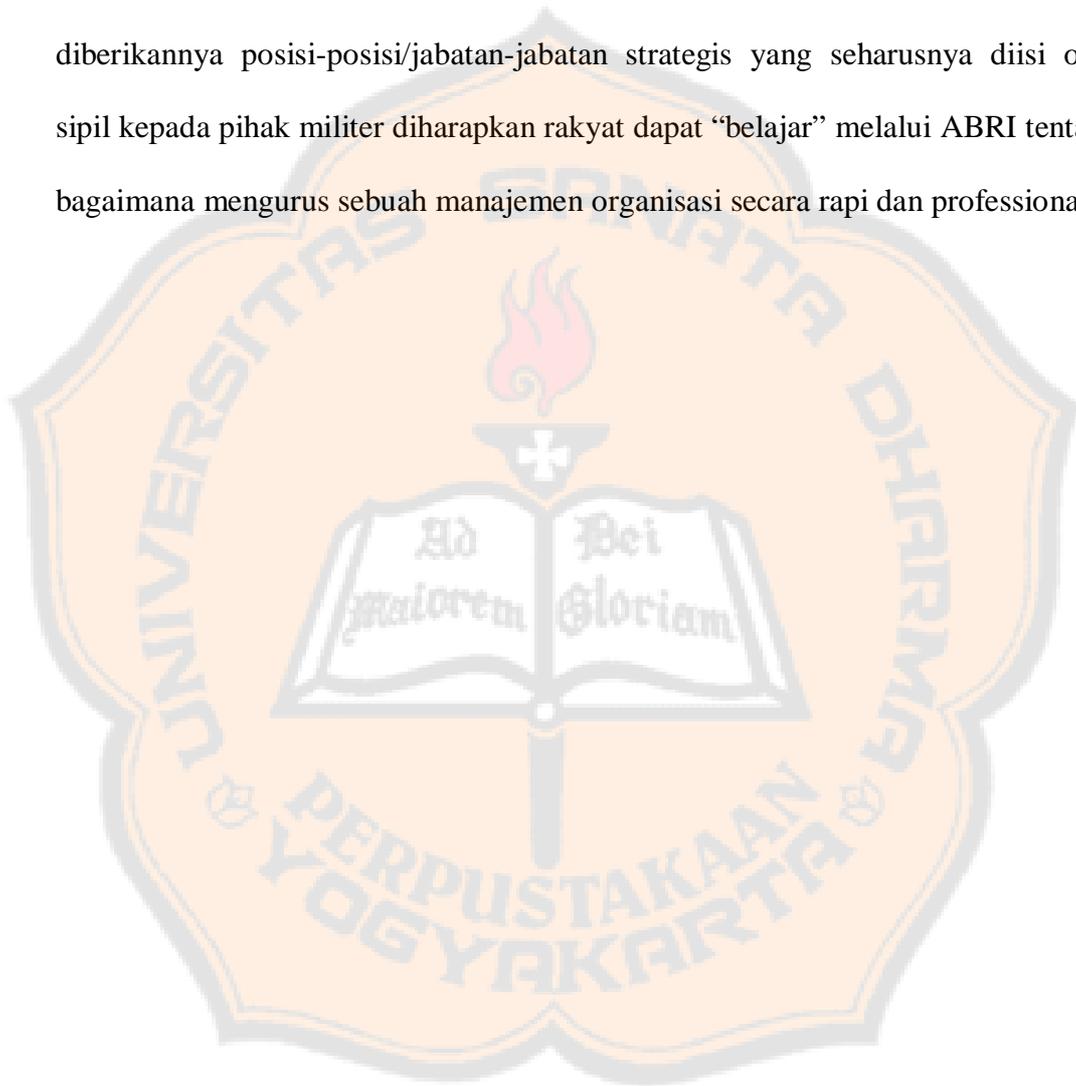
Awal dominasi ABRI sendiri semakin mendapatkan pemantapan melalui amanat yang disampaikan oleh Presiden Suharto pada Rapat Pimpinan ABRI pada 3 Maret 1969 yang berbunyi “semangat korps, loyalitas kepada tugas, disiplin, organisasi yang lincah, prosedur, dan tata kerja yang jelas, sistem pertanggungjawaban yang tegas, tanggung jawab pimpinan yang penuh, delegasi kekuasaan ke bawah dan sebagainya, adalah prinsip-prinsip umum dan manajemen yang dimiliki oleh ABRI. Setiap anggota ABRI yang diberi tugas karya harus menyebarkan secara positif semangat dan teknik berorganisasi yang baik ini”. Selanjutnya dalam Rapat Pimpinan ABRI 23 Februari 1970 dikemukakan bahwa “ABRI harus dapat menjadi kekuatan modernisasi masyarakat, menggerakkan pembangunan oleh kekuatan-kekuatan masyarakat sendiri, justru karena ABRI sangat kaya dengan pengalaman dalam membina masyarakat pada masa-masa sulit dulu, karena sistem organisasinya yang baik, karena sifatnya uyang pragmatif, karena jiwa pengabdian kepada kepentingan nasional dan karena ketegasan dalam kepemimpinannya”.¹⁴

Melalui pidato-pidato semacam inilah dapat ditarik kesimpulan bahwa secara eksplisit Presiden Suharto memuji kemampuan-kemampuan ABRI dalam menjadi pemimpin bagi rakyat dalam era pembangunan yang menurutnya memiliki jiwa pengabdian yang lebih luhur. Sedangkan terkait pernyataannya

¹³ Rumusan ini sendiri lahir dari Penjelasan UU no.15 tahun 1969 tentang Pemilu anggota-anggota MPR/DPR serta UU no.16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

¹⁴ Nugroho Notosusanto. *op.,cit*, hal. 246

tentang ABRI yang sangat kaya dengan pengalaman dalam membina masyarakat sejak masa awal kemerdekaan dulu, memang menjadi semacam pernyataan bahwa kalangan sipil pada masa itu belum terlalu siap untuk diberikan tanggung jawab yang besar dalam usaha untuk mendukung pembangunan, sehingga dengan diberikannya posisi-posisi/jabatan-jabatan strategis yang seharusnya diisi oleh sipil kepada pihak militer diharapkan rakyat dapat “belajar” melalui ABRI tentang bagaimana mengurus sebuah manajemen organisasi secara rapi dan professional.



BAB III

PELAKSANAAN DWIFUNGSI ABRI PADA MASA ORDE BARU

A. Latar Belakang Kedekatan Golongan Militer dengan Pemerintah Orde Baru

Peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965/G30S yang disebut-sebut didalangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) membawa hikmah tersendiri bagi golongan militer khususnya Angkatan Darat (AD) yang berhasil menampilkan dirinya sebagai pembela Pancasila dan sebagai *leader* dalam gerakan penumpasan pemberontakan G30S yang dimotori oleh kekuatan komunis tersebut. Dalam usahanya untuk menumpas kekuatan-kekuatan PKI tersebut, Angkatan Darat yang dimotori oleh Pangkostrad¹ (panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) Letjen Suharto terus berupaya menyingkirkan serta membersihkan semua potensi ancaman dari PKI dalam berbagai sektor, mulai dari para menteri kabinet Dwikora, dalam lingkungan internal angkatan bersenjata, bahkan sampai ke lapisan masyarakat bawah.² Kehadiran Letjen Suharto yang merupakan Panglima Kostrad dan secara langsung mewakili citra Angkatan Darat yang loyal kepada Pancasila membuat kepemimpinannya terhadap operasi penumpasan PKI semakin mendapatkan tempat di hati rakyat pada saat itu.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penumpasan sektor tertentu dari pengaruh-pengaruh PKI juga meliputi kedua angkatan bersenjata lainnya seperti

¹ Kostrad adalah bagian dari Komando Utama (KOTAMA) tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kostrad memiliki pasukan berkisar antara 25.000 sampai 26.000 personel yang memiliki selalu siap untuk beroperasi atas perintah panglima TNI kapan saja.

² A.K Wiharyanto, *Sejarah Indonesia: Dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*, Yogyakarta, Sanata Dharma, 2011, hal. 171

Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Dalam pembersihan terhadap AL dan AU membuat tidak sedikit para perwira tinggi dari kedua angkatan tersebut yang ditahan kemudian diadili di Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa). Penahanan terhadap pemimpin dua angkatan bersenjata lainnya (AL dan AU) memperlemah posisi dan kedudukannya di hadapan pemerintah saat itu, situasi ini kemudian berhasil membuat posisi Angkatan Darat semakin kuat dan dominan.

Kolaborasi Letjen Suharto dengan Angkatan Darat yang saling bahu-membahu dalam penumpasan PKI membuat kedekatan diantara keduanya menjadi semacam ikatan yang tak dapat diputuskan dikemudian hari. Loyalitas yang dimiliki oleh Angkatan Darat pada masa-masa kekacauan politik, membuat jalan bagi Letjen Suharto menuju puncak kepemimpinan terlihat cukup mulus karena dalam prosesnya terlihat matang dan penuh perencanaan.

Proses dominasi Angkatan Darat dengan Letjen Suharto sebagai motornya, diawali oleh keberhasilan Letjen Suharto sendiri dalam memperoleh mandat langsung dari Presiden Sukarno untuk mengerahkan segenap kekuatan untuk memulihkan kondisi yang sedang kacau pada masa itu. Pemberian mandat kepada Letjen Suharto melalui Surat Perintah yang dikenal sebagai Supersemar (Surat perintah Sebelas Maret) membuat Angkatan Darat seakan-akan mendapatkan wewenang yang luar biasa dan cenderung tanpa batasan yang jelas.³ Wewenang tanpa batas yang dimiliki oleh Letjen Suharto dan Angkatan Darat membuka kesempatan bagi keduanya untuk menyingkirkan semua golongan yang pro terhadap Sukarno dan PKI serta menggantinya dengan orang-orang yang dinilai

³ A.K Wiharyanto, *op.cit*, hal. 156

bisa diajak bekerja sama bahkan apabila perlu diganti dengan orang-orang Angkatan Darat. Sebagai contoh paling nyata adalah ketika usaha Letjen Suharto untuk membersihkan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dari unsur-unsur PKI, A.H Nasution yang sebelumnya menjabat sebagai Menpangab (Menteri Panglima Angkatan Bersenjata) kemudian ditunjuk menjadi Ketua MPR,⁴ yang merupakan salah satu jabatan paling vital selain Presiden pada masa itu.⁵

Hubungan yang sedemikian rupa antara Letjen Suharto dengan kesatuannya yang dalam hal ini adalah Angkatan Darat menciptakan semacam simbiosis mutualisme, dimana kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, yang mana dipihak Letjen Suharto “dibantu” proses menuju kursi kepresidenan sedang dilain pihak pada waktunya menjadikan Angkatan Darat sebagai anak emas yang selalu mendapat prioritas utama dan kompensasi-kompesasi tertentu baik berupa jabatan atau diberikan wewenang untuk “mengawasi” sektor tertentu pada masa Orde Baru di kemudian hari. Situasi yang sama terus berlanjut hingga pada masa kekuasaan Orde Baru yang semakin membuktikan bahwa telah terjadi kondisi saling membutuhkan diantara keduanya (antara Suharto dan Angkatan Darat).

Dengan demikian sejarah perpolitikan di Indonesia mulai memasuki sebuah tahapan baru pasca peristiwa G30S. militer yang muncul sebagai kekuatan baru, berkembang menjadi kekuatan sosial-politik yang paling menentukan di

⁴ Melalui A.H Nasution sebagai Ketua MPR, ketetapan Sukarno sebagai Presiden seumur hidup kemudian dibatalkan, dan beberapa waktu setelahnya MPR dibawah A.H Nasution jugalah yang kemudian dengan kuasanya sebagai ketua MPR “berhasil” memberhentikan Sukarno sebagai Presiden serta mengangkat Suharto sebagai penggantinya.

⁵ M.R Karim, *Peranan ABRI dalam Politik*, Jakarta, Haji Masagung, 1989, hal. 49

Indonesia, baik dalam menentukan arah politik dalam negeri maupun politik luar negeri Indonesia dalam pergaulan dunia internasional.⁶

B. Golongan Militer Sebagai Pendukung Kekuatan Politik Pemerintah

Orde Baru

Golongan militer khususnya Angkatan Darat di Indonesia tidak pernah membatasi dirinya hanya sebagai kekuatan militer belaka. Dalam masa revolusi tahun 1945 sampai 1949, tentara terlibat dalam perjuangan kemerdekaan di mana tindakan politik dan militer saling berkaitan tak terpisahkan. Segera setelah peralihan kekuasaan di akhir 1945, secara resmi golongan militer menerima asas keunggulan kekuasaan sipil. Para perwira beranggapan bahwa peranan mereka di bidang politik sewaktu-waktu diperlukan, tetapi mereka tidak pernah muncul sebagai kekuatan politik yang utama di tengah-tengah arena. Namun, sepadan dengan kelemahan kehidupan politik yang disebabkan oleh sistem Parleментар yang makin lama makin nyata, bagaimanapun telah memperkuat keyakinan di kalangan perwira-perwira militer bahwa mereka juga mempunyai beban dan tanggung jawab untuk campur tangan agar negara dapat diselamatkan. Meskipun pihak pimpinan golongan militer tidak secara langsung bertanggung jawab terhadap kemacetan sistem parlementer di tahun 1957, mereka dapat memanfaatkan situasi untuk mengumumkan keadaan darurat perang, yang akhirnya setapak demi setapak memungkinkan para perwira militer mendapatkan peran yang lebih besar dalam fungsi-fungsi politik, administrasi dan ekonomi.⁷

⁶ Leo Suryadinata, *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Suharto*, LP3ES, Jakarta. 1996

⁷ M.R Karim., *op.cit*, hal.38

Untuk memperoleh dasar pembenaran terhadap kelanjutan peranan militer dalam fungsi-fungsi tersebut setelah krisis terlewati, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Mayjen Abdul Haris Nasution kemudian merumuskan sebuah konsep yang bernama “jalan tengah” yang menetapkan bahwa pihak tentara tidak akan mencari kesempatan untuk mengambil alih pemerintahan, namun juga tidak akan bersikap acuh tak acuh terhadap politik. Selain itu militer juga menuntut hak mereka untuk tetap duduk dalam pemerintahan, lembaga perwakilan dan administrasi.⁸ Dalam seminar pertama yang diselenggarakan pada bulan April 1965, golongan militer mencetuskan suatu doktrin yang menyatakan bahwa angkatan bersenjata memiliki peranan ganda yaitu sebagai “kekuatan militer” dan “kekuatan sosial politik”.⁹ Sebagai kekuatan “sosial politik” kegiatan-kegiatan tentara meliputi bidang-bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan.

Konsep “jalan tengah” yang dicetuskan oleh Mayjen A.H Nasution dengan tujuan untuk meyakinkan kalangan sipil bahwa kalangan militer mampu menahan diri untuk tidak turut campur tangan secara langsung dalam pemerintahan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu membendung “invasi” kalangan militer itu sendiri untuk turut seraf terjun langsung ke gelanggang perpolitikan, bahkan kemudian justru muncul beberapa doktrin yang sifatnya dicetuskan untuk membenarkan keterlibatan militer di dalam politik diantaranya doktrin yang

⁸ Sundhaussen, *The Political Orientation and Political Involvement of The Indonesian Officers Corps, 1945-1966: The Siliwangi Division and The Army Headquarters*. (thesis Ph.D., Monash University), 1971, hal. 389

⁹ Selain mencetuskan konsep “jalan tengah, pada tahun yang sama Angkatan Darat menyusun konsep perjuangan yang lain yaitu “Tri Ubaya Sakti” dengan tujuan yang sama, yakni untuk memperluas peranan militer dalam bidang politik

paling terkenal yaitu “Dwifungsi ABRI”. Melalui Dwifungsi ABRI inilah kemudian membuka jalan menuju terciptanya kolaborasi terbuka antara golongan militer dengan pemerintah Orde Baru semakin lekat.

C. Golongan Militer Sebagai Pendukung Kekuatan Ekonomi Pemerintah Orde Baru

Dominasi golongan militer yang dimotori oleh Angkatan Darat atas kehidupan politik akhirnya mendapat pembenaran ketika muncul Dwifungsi ABRI yang dikatakan mampu “mengatur” secara jelas fungsi-fungsi ABRI baik dalam bidang Hankam maupun politik. Selain pembenaran yang didasarkan kepada Dwifungsi ABRI, proses keterlibatan golongan militer ke dalam pemerintahan Orde Baru tidak terlepas dari janji-janji pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang mana sangat membutuhkan keterlibatan militer di dalamnya, dengan alasan kalangan militer memiliki kemampuan yang lebih kompeten dan memiliki kedekatan secara khusus dengan Suharto.

Pada masa Orde baru, kalangan militer tidak hanya menampilkan dirinya sebagai stabilisator,¹⁰ tetapi juga menyebut dirinya sebagai dinamisator dan merasa dibutuhkan untuk tugas itu, agar dapat memainkan peranan penting di bidang ekonomi. Bertolak pada anggapan bahwa pembangunan ekonomi di masa lalu (masa Orde Lama) telah terbengkalai karena pemerintah yang didominasi kalangan sipil tidak berhasil mengatasi perebutan kepentingan golongan, yang di dalamnya terdapat partai-partai politik mempunyai landasan berpijak. Kalangan militer dengan dominasi Angkatan Daratnya berusaha menampilkan citra sebagai

¹⁰ Kartini Kartono, *ABRI dan permasalahannya : Pemikiran Reflektif Peranan ABRI di Era Pembangunan*, Bandung, Mandar Maju, 1996, hal.3

kekuatan nasional yang lekat dengan memperjuangkan kepentingan umum dan sudah sewajarnya giliran bagi mereka untuk memerintah.

Para pemimpin militer berpendapat bahwa dengan dominasinya, jaminan akan terpeliharanya kestabilan politik yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi akan tercapai. Mereka berharap dengan terciptanya stabilitas maka akan dapat mendorong pertumbuhan investasi – baik dari luar maupun dari dalam negeri – yang makin besar di sektor-sektor perekonomian yang modern, seperti dalam industri-industri ekstraktif, pabrik-pabrik besar dan perdagangan. Peranan pemerintah sebagian besar dilihat dalam arti menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penggunaan kesempatan-kesempatan berdagang yang baru untuk para penanam modal asing dan kepentingan para pengusaha Indonesia. Dalam jangka panjang pembangunan ekonomi diharapkan akan dapat menaikkan taraf hidup umum sebagian besar rakyat. Dengan demikian, konsep militer mengenai pembangunan ekonomi terutama diarahkan kepada kepentingan-kepentingan kaum elite dan pegawai-peagawai kantor kelas menengah. Dalam situasi yang baru para perwira militer yang telah berpengalaman dalam kegiatan perdagangan dan birokrasi selama masa Demokrasi Terpimpin dapat dengan mudah menyesuaikan diri untuk mengambil keuntungan dari kebijakan baru yang mulai diperkenalkan setelah tahun 1966. Dengan melakukan hubungan bersama para pengusaha Cina dan penanam modal asing lainnya, mereka semakin mendominasi dunia perdagangan.

Perluasan kesempatan berdagang memang sangat penting untuk menunjang peranan militer yang diwakili Angkatan Darat sebagai stabilisator. Dengan

warisan administrasi yang kacau serta perekonomian yang merosot tajam, pemerintah Orde Baru merasa bahwa kecil harapan untuk mendapatkan dana yang cukup bagi pendanaan angkatan bersenjata apabila dilakukan melalui cara-cara yang biasa berlaku, tetapi juga amat disadari bahwa kegagalan pemerintah yang sebelumnya dalam memberikan kesejahteraan kepada personel-personel militer telah menimbulkan ketidakpuasan dan berakibat pada pemberontakan terbuka. Dalam kondisi yang demikian, maka pimpinan Angkatan Darat memutuskan untuk mengizinkan praktek-praktek yang sudah berlangsung sejak awal tahun 1960-an, di mana Angkatan Darat berusaha mencari sendiri dana-dana untuk menambah apa yang tersedia dari anggaran belanja negara, sedangkan para perwiranya diperbolehkan bekerja untuk tujuan ekonomi masing-masing guna menambah pendapatan dari gaji.

Penerapan sistem keuangan yang bersifat inkonvensional bagi angkatan bersenjata oleh pemerintah ternyata mampu menimbulkan kesan bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan tidak naik demi kepentingan pembangunan ekonomi, sedangkan alokasi anggaran negara untuk pertahanan dan keamanan pada akhir 1960-an hanya berjumlah sepertiga sampai setengah dari pengeluaran sesungguhnya – suatu kenyataan yang tidak pernah diumumkan secara resmi.¹¹ Pemimpin-pemimpin militer mengetahui bahwa pentingnya perluasan kesempatan mencari uang oleh tentara, sehingga anggota-anggota militer, khususnya yang berada di daerah-daerah akan tetap puas. Sejalan dengan itu, praktek keuangan yang tidak biasa itu menciptakan kebutuhan akan

¹¹ Harold Crouch, *Militer dan Politik Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1986, hal. 309

adanya sistem, di mana perwira-perwira tertentu harus berada pada jabatan yang tertentu pula dan menjadi penunjang bagi terciptanya kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan pribadi.

D. Dominasi Kekuasaan Golongan Militer dalam Struktur Pemerintahan Orde Baru

Walaupun Angkatan Darat sebenarnya mendominasi pemerintah setelah tahun 1966, namun di dalam pemerintahan yang diikutsertakan berbagai tipe orang sipil, dengan tujuan menarik keahlian dan pengalaman mereka serta untuk menciptakan suasana atau kesan dalam negeri yang benar sekaligus menciptakan gambaran yang baik terhadap negara-negara Barat yang memberikan bantuan keuangan.

Penampilan kerjasama sipil-militer paling nyata terlihat dalam komposisi kabinet, di mana anggota-anggota militer selalu merupakan minoritas dan makin berkurang dalam perombakan-perombakan cabinet berikutnya. Dari 27 anggota kabinet yang diangkat oleh Suharto pada bulan Juli 1966, sebanyak 6 menteri diambil dari Angkatan Darat dan 6 lagi termasuk panglima-panglima dari tiap-tiap angkatan bersenjata lainnya. Wakil Angkatan Darat menduduki Departemen Pertahanan dan Keamanan serta Departemen Dalam Negeri yang merupakan departemen-departemen kunci, dan juga departemen-departemen yang penting di bidang ekonomi.

Meskipun kekuasaan Angkatan Darat dalam pemerintahan makin ketat beberapa tahun sesudahnya, namun perwakilan dalam kabinet turun sampai menjadi empat di antara 23 orang pada tahun 1968 dan tiga orang lagi setelah

pemilihan umum tahun 1971, walaupun kemudian bertambah satu orang lagi di tahun 1973. Angkatan bersenjata lainnya hanya diwakili oleh masing-masing satu orang menteri dari Angkatan laut dan Angkatan Udara sejak tahun 1968 dan sesudah 1971 hanya ada satu perwira Angkatan Udara yang kemudian diganti oleh orang sipil pada tahun 1973.

Rasio perbandingan jumlah antara golongan sipil dengan militer dalam kabinet memang di dominasi oleh kalangan sipil, namun mereka tidak memiliki dukungan politik yang cukup untuk melaksanakan kekuasaan yang sebenarnya.. wakil partai-partai yang mempunyai potensi memobilisasi dukungan popular, khususnya PNI dan NU makin lama makin berkurang dengan diangkatnya menteri-menteri yang kemampuannya terutama bersifat teknokratik. Dalam kabinet yang diangkat pada bulan Juli 1966, PNI dan NU masing-masing diberikan dua tempat, sedangkan sepuluh orang sipil lainnya sebagiannya tidak berafiliasi dengan partai atau merupakan anggota dari partai-partai kecil yang mempunyai basis massa. Sifat kabinet yang teknokratik itu semakin nyata pada tahun 1968 ketika departemen yang penting yaitu perdagangan dan keuangan masing-masing diserahkan kepada professor-profesor Sumitro dan Ali Wardhana, sedang pada tahun 1971 empat ahli ekonomi terkemuka lagi termasuk professor Widjojo Nitisastro masuk dalam komposisi kabinet yang pada waktu itu beranggotakan sepuluh professor dan beberapa orang lainnya yang berkemampuan akademik tinggi. Walaupun partai-partai politik masih terwakili secara nominal, tetapi kabinet sesungguhnya berciri teknokratik, dengan anggota-anggota sipil yang melakukan tugasnya lebih sebagai pegawai negeri belaka

daripada pemimpin-pemimpin politik. Seperti kabinet yang dipimpin Sukarno, kabinet di era Suharto bukanlah suatu badan pembuat keputusan, tetapi kabinet yang mengadakan pertemuan terutama untuk mendengarkan garis-garis besar dari presiden dan melapor kepadanya. Sebagai anggota komisi stabilisasi ekonomi, para ahli ekonomi dalam kabinet memainkan peranan penting dalam menggariskan kebijakan ekonomi, akan tetapi tidak memiliki kekuatan secara politik, sehingga, mereka harus menyesuaikan diri untuk membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan di dalam kerangka yang telah disusun oleh para jenderal.

Kekuasaan bertindak para menteri sipil selanjutnya juga dibatasi oleh pengangkatan perwira-perwira Angkatan Darat ke posisi-posisi tinggi dalam kedudukan sipil. Dari 20 departemen yang berurusan dengan urusan sipil pada tahun 1966, para perwira Angkatan Darat menduduki posisi sekretaris jenderal di sepuluh departemen dan seorang perwira Angkatan Laut pada satu departemen. Di antara 64 direktur jenderal yang diangkat pada waktu yang sama, 15 adalah perwira Angkatan Darat dan delapan orang dari ketiga angkatan lainnya. Hanya ada dua departemen yang menterinya bukan jenderal Angkatan Darat, yang tidak mempunyai perwira Angkatan Darat di tingkat sekretaris jenderal atau direktur jenderal, satu dari antara itu adalah Departemen Urusan Maritim yang didominasi oleh Angkatan laut.¹² Peranan militer dalam struktur pemerintah tetap penting pada tahun-tahun berikutnya.

¹² *Ibid.*, hal. 270

Walaupun peranan kabinet dalam awal-awal tahun pemerintahan Orde baru terutama adalah koordinasi administratif, banyak di antara keputusan kebijakan dibuat oleh satu kelompok perwira Angkatan Darat terpilih yang dipercayai oleh Suharto. Deputi Panglima Angkatan Darat Letna Jenderal Panggabean dan Menteri Dalam Negeri Mayor Jenderal Basuki Rahmat – sampai meninggalnya pada tahun 1969 – memiliki pengaruh besar. Penguasaan sepenuhnya komoditi ekspor terpenting Indonesia yaitu minyak diserahkan kepada Mayor Jenderal Ibnu Suwoto. Sebuah badan baru, Badan Logistik Nasional (Bulog) didirikan dan dikepalai oleh Brigadir Jenderal Achmad Tirtosudiro yang memegang kuasa penuh atas perdagangan bahan mentah, sedangkan Brigadir Jenderal Suhardiman menguasai perusahaan dagang raksasa, PT Berdikari. Sedangkan dalam urusan yang paling penting, Suharto membentuk staf pribadinya (Spri), yang pada waktu pembentukannya bulan Agustus 1966 terdiri dari enam perwira Angkatan Darat dan dua tim spesialis yang bertugas memberikan nasihat dalam kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan politik.

Pada tahun 1968 Aspri berkembang menjadi 12 dan sering dipandang sebagai “kabinet bayangan” yang menghimpun kekuatan-kekuatan yang sebenarnya. Dengan dipimpin oleh Mayor Jenderal Alamsjah, anggota-anggota intinya terdiri dari Mayor Jenderal Surjo yang pernah mengepalai seksi keuangan Koti dan tiga perwira yang relative muda, yang pernah bekerja di bawah komando Suharto sewaktu menjadi panglima Divisi Diponegoro dari Jawa Tengah pada akhir tahun 1960-an. Mereka adalah Kolonel Ali Murtopo, Sudjono Humardani dan Brigadir Jenderal Yoga Sumatama. Sudjono Humardani mempunyai

latarbelakang menangani keuangan militer dan Ali Murtopo juga mengepalai suatu badan khusus serba guna yang dikenal dengan nama Opsus (Operasi Khusus), yang semula dibentuk dilingkungan Kostrad ketika berlangsung kontak-kontak rahasia dengan Malaysia selama kampanye konfrontasi. Sebagai tanggapan terhadap kritik umum yang dilancarkan mengenai “Kabinet bayangan” ini, Suharto membubarkan Aspri secara formal pada tahun 1968, tetapi anggota-anggotanya yang penting tetap memiliki pengaruh besar seperti sebelumnya.¹³

Posisi dominan perwira-perwira Angkatan Darat dalam pemerintahan pusat turut dibarengi dengan perkembangan serupa pada perwakilan Angkatan Darat dalam administrasi regional. Di awal tahun 1966, 12 di antara 24 gubernur provinsi adalah perwira-perwira Angkatan Darat, termasuk mereka yang berada di provinsi-provinsi penting seperti Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Pada tahun 1968 jumlah perwira Angkatan Darat menjadi 16, dan Seorang perwira Angkatan Laut Letnan Jenderal Ali Sadikin dari KKO menjadi gubernur Jakarta. Setelah pemilihan umum tahun 1971 jumlah gubernur-gubernur sipil turun menjadi empat di antara 26 gubernur.

Secara jumlah, para perwira Angkatan Darat yang diangkat ke posisi-posisi administrasi regional juga naik di tingkat bupati-bupati dan walikota-walikota. Di Jawa Tengah dan Timur para perwira militer dengan cepat menggantikan PKI dan walikota-walikota yang ada hubungannya dengan PKI dan bupati-bupati di tahun 1965, kemudian dalam beberapa tahun sesudahnya banyak lagi orang-orang sipil diganti tidak hanya di daerah-daerah ini tetapi juga hamper di seluruh Indonesia.

¹³ *Idem*

Antara tahun 1965 dan 1968 jumlah bupati dan walikota sipil turun dari 15 menjadi 3 di Jawa Barat, 38 menjadi 19 di Jawa Tengah dan Yogyakarta, 33 menjadi 20 di Jawa Timur, dari 23, 40, dan 37 secara berturut-turut. Pada tahun 1969 jumlah bupati dan walikota militer naik menjadi 147 dari 271 di seluruh Indonesia.¹⁴ Setelah pemilihan tahun 1971 perbandingan mencapai dua pertiga.¹⁵

Sebagai penjabar terhadap persentase dan di sektor-sektor apa saja kalangan militer turut “berkarya”, dapat dilihat dalam tabel rincian jumlah anggota ABRI yang ditempatkan di luar bidang Hankam/ABRI antara rentang Mei 1977 sampai dengan November 1980. (lihat lampiran hal.67).¹⁶ Dari tabel tersebut, terlihat jelas betapa luasnya “peranan” yang diemban oleh militer dalam pemerintahan Orde Baru. Penempatan anggota ABRI di berbagai sektor dan tingkat jabatan membuat hampir tidak ada departemen yang tidak ada orang-orang militernya. Kondisi yang demikian membuat orang-orang sipil yang ditempatkan di sektor/departemen yang sama menjadi merasa dihilangkan sebagian wewenangnya karena secara pengaruh, mereka jauh lebih kalah dibandingkan orang-orang militer.

Dominasi Angkatan Darat atas perangkat pemerintahan di semua tingkat memungkinkan Angkatan Darat menentukan nada dari seluruh administrasi. Walaupun posisi-posisi kekuasaan dibagi dengan orang sipil namun kalangan sipil harus menyesuaikan dengan sistem di mana kekuasaan terletak di tangan militer. Kontrol administrasi tidak hanya berarti bahwa Angkatan Darat mempunyai

¹⁴ Harold Crouch, *op.cit*, hal. 272

¹⁵ Tinker, Irene dan M. Walker, *Planning For Regional Developmentn in Indonesia*, Asian Survey, 1973, hal. 1102

¹⁶ Nugroho Notosusanto, *Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*, Jakarta, Sinar Harapan, 1985, hal. 378

pengaruh kuat atas kebijakan-kebijakan pemerintah di semua lini, tetapi juga bahwa para perwira dapat membagi-bagikan jasa dan memberikan perlindungan terhadap rekan-rekan militer dan kawan-kawan sipil mereka. Pengangkatan di seluruh birokrasi jadinya bergantung pada persetujuan perwira-perwira Angkatan Darat dan hak mengeluarkan izin-izin, memberikan kontrak-kontrak dan memberikan keputusan atas proyek-proyek, memberikan jalan bagi Angkatan darat untuk membalas jasa mereka yang menerima dominasi militer dan menghukum mereka yang menolak. Seterusnya kekuasaan Angkatan Darat untuk mengangkat para pejabat pemerintahan memungkinkan Angkatan darat memperoleh kedudukan-kedudukan yang menguntungkan dan terpendang, serta memberikan berbagai kesempatan berusaha sebagai imbalan kepada perwira-perwira yang keras kepala yang disingkirkan dari komando-komando kemiliteran.¹⁷

¹⁷ Harold Crouch., *op.cit*, hal. 272

BAB IV

DAMPAK PELAKSANAAN DWIFUNGSI ABRI PADA MASA ORDE BARU

Munculnya dominasi militer melalui Angkatan Darat-nya dalam pemerintahan Orde Baru yang merupakan bentuk aplikasi doktrin Dwifungsi ABRI berdampak langsung dalam berbagai bidang, terutama bidang-bidang yang menjadi konsentrasi dominasi seperti bidang sosial-politik dan ekonomi. Selain dalam bidang sospol dan ekonomi, dominasi Angkatan Darat juga berdampak langsung terhadap almamaternya sendiri, di mana terciptanya kesempatan berkarier di luar bidang Hankam menyulut persaingan dalam internal Angkatan Darat itu sendiri.

A. Dampak Dalam Bidang Sosial- Politik

Kehadiran golongan militer sistem pemerintahan pada masa Orde baru membawa dampak yang begitu besar dan sangat dirasakan terutama dalam bidang sosial-politik. Dampak paling nyata dari dominasi golongan militer terlihat pada “pengebirian” terhadap partai-partai politik dan pembentukan Partai Golongan Karya (Golkar) oleh penguasa militer sebagai partai tandingan , sedangkan dalam bidang sosial dampak yang paling jelas yaitu korupsi yang merajalela dan melibatkan banyak perwira tinggi dalam kasus tersebut.

1. “Pengebirian” Terhadap Partai-partai Politik Saingan Pemerintah Orde Baru

Dominasi Angkatan Darat yang tak tertandingi dalam pemerintahan hanya mendapat reaksi positif dari segelintir kalangan politisi sipil, sedangkan sebagian

besar lainnya menerima fakta itu sebagai sebuah hal yang tak dapat dihindarkan. Dalam masa pergolakan yang terjadi sebelumnya, pihak Angkatan Darat seolah-olah menjamin sebuah iklim politik yang lebih stabil. Selanjutnya banyak kalangan sipil berharap bahwa dalam suasana baru Angkatan Darat akan merasakan pentingnya mencari popularitas dan dukungan dengan jalan mengikutsertakan sipil dalam pemerintahan. Sepertinya dalam jangka panjang stabilitas politik menuntut dibentuknya kerangka politik yang baru, yang juga mencakup kelompok-kelompok sipil. Namun pada kenyataannya, ketika pada akhirnya pemerintahan terbentuk, peran serta masyarakat umum/sipil melalui partai-partai politik ternyata tidak berhasil mendapatkan tempat yang layak.

Peran apa yang boleh dijalankan oleh partai-partai politik di masa Orde Baru pada mulanya tidak jelas. Perwira-perwira Angkatan Darat pada umumnya tidak begitu menghormati mereka, sebagian besar politisi partai yang terkemuka selama Demokrasi Terpimpin, dan menganggap partai-partai politik sebagai mesin pelindung bagi kepentingan-kepentingan sebagian masyarakat belaka. Setelah mendapatkan kekuasaan atas pemerintahan, para pemimpin Angkatan Darat tidak bermaksud mengalihkan kekuasaan kepada partai-partai politik atas nama “demokrasi”. Sekelompok perwira senior yang berani menentang, yaitu mereka yang terpengaruh oleh anggota-anggota partai terlarang seperti PSI, dan erat bekerjasama dengan para mahasiswa dan cendekiawan dalam kesatuan-kesatuan aksi seperti KAMI dan KASI,¹ berpendapat bahwa harus diambil tindakan tegas untuk mencegah timbulnya kembali partai-partai sebagai kekuatan

¹ Kesatuan-kesatuan aksi yang dipelopori oleh kalangan Mahasiswa dan Sarjana, pada dasarnya gerakan semacam ini secara resmi dibubarkan pada Februari 1966, namun hal itu tidak berarti “kekritisannya” mahasiswa dan kalangan terpelajar lainnya berkurang terhadap pemerintah.

politik lokal dan nasional yang penting, dan bahwa Angkatan Darat harus bersandar pada kesatuan-kesatuan aksi untuk memperoleh dukungan. Di lain pihak, panglima dan komandan-komandan daerah serta lokal umumnya mengakui bahwa partai-partai yang telah mapan itu benar-benar berakar dalam masyarakat dan ini memungkinkan mereka untuk menghimpun oposisi rakyat melawan pemerintah sehingga untuk menyingkirkan mereka. Dengan demikian hampir seluruh pimpinan Angkatan Darat segan memulai pertarungan dengan partai-partai, yang mungkin akan mengakibatkan pergolakan politik dan tentu akan menambah kesulitan bagi komandan-komandan militer daerah maupun lokal yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban. Perwira-perwira kelompok kedua ini biasanya tidak begitu bersimpati terhadap aspirasi partai-partai politik, tetapi mereka tidak segera bertindak terhadap partai-partai tersebut.

Alasan “kalangan militan” yang antipartai tersebut didasarkan pada kepercayaan bahwa pimpinan Angkatan Darat setia pada modernisasi dan pembangunan, sedangkan partai-partai lebih cenderung memperjuangkan kepentingan segolongan masyarakat yang tidak sesuai dengan tujuan dan cita-cita nasional. Dalam pandangan ini, penindakan terhadap partai akan menciptakan kesempatan bagi pemerintah untuk melaksanakan programnya, tanpa dirintangi oleh persoalan pemberian konsesi-konsesi kepada kepentingan-kepentingan pribadi yang diajukan oleh para politisi partai. Sebagai pengganti partai-partai politik, maka dipertimbangkan pembentukan organisasi sipil yang baru yang menarik anggotanya dari kalangan generasi muda, yang penuh semangat dan berperan serta dalam gerakan melawan Sukarno dan Orde Lama pada waktu

sebelumnya. Tidak seperti partai-partai lama yang mengakarkan diri pada kebiasaan-kebiasaan dan kesetian kelompok di masa lampau, kekuatan politik sipil yang baru ini diharapkan dapat memberikan dukungan penuh kepada program-program pemerintah mengenai modernisasi. Selanjutnya, walaupun tidak disebutkan secara terbuka, namun terlihat jelas bahwa organisasi-organisasi baru ini tidak akan mendapat banyak dukungan dari partai-partai lama, khususnya yang di daerah-daerah atau di luar kota-kota besar, sehingga dengan demikian tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mereka setujui.

Ketika serangan-serangan semakin gencar ditujukan terhadap partai-partai yang disuarakan oleh “kalangan militan” ditolak oleh “kalangan moderat” yang berada di sekeliling Suharto pada tahun 1967 dan tahun 1968, beberapa gagasan dari pendekatan militer terhadap hubungan militer sipil tetap memberi pengaruh. Setelah gejolak dan ketegangan yang berlangsung selama delapan belas bulan lamanya menjelang pemberhentian Sukarno berlalu, pimpinan Angkatan Darat tidak ingin menciptakan masa tegang dan tidak tentu dengan cara menghasut partai-partai politik secara tidak perlu. Jika ditilik lagi ke belakang, terlihat jelas bahwa banyak di antara kelompok moderat di kalangan Angkatan Darat menyetujui pendapat golongan militan mengenai pemimpin-pemimpin partai dan juga masih tetap dengan tujuan jangka panjang mereka untuk menghancurkan partai-partai lama, tetapi memandang masalahnya sebagai sesuatu yang tidak terlalu mendesak hingga lebih memilih cara-cara yang bertahap. Tanpa melakukan tekanan secara langsung yang bersifat “perang terbuka” yang tentu saja akan

merugikan Angkatan Darat sendiri, pada akhirnya mereka mengatur strategi “lunak” untuk mengalahkan partai-partai dengan permainan mereka sendiri, yaitu melalui pemilihan umum pada tahun 1971. Dengan membentuk dan mengembangkan organisasi sipil sendiri untuk bertanding dalam pemilu². Melalui “tangan sipilnya” Angkatan Darat dijamin akan mendapatkan kemenangan yang telak, sehingga dapat mengurangi pengaruh organisasi sipil yang tak dapat dikontrol oleh pemerintah hingga ke akar-akarnya. Pada akhirnya di tahun 1973 dikarenakan tekanan yang terus bertubi-tubi, partai-partai lama “secara sukarela” membubarkan diri dan kemudian membentuk dua partai baru dengan kepemimpinan yang mendapat restu dari pemerintah Orde Baru.

2. Pembentukan Partai Golkar oleh Golongan Militer

Dalam usaha menanamkan dominasinya dalam bidang politik, sesungguhnya Angkatan Darat selalu menempatkan partai-partai saingannya sebagai kompetitor yang sangat mengganggu mulusnya perjalanan menuju kekuasaan. Hal ini terbukti jelas ketika di masa pemerintahan Sukarno, di saat PKI berhasil bertransformasi menjadi partai besar dan memenangkan pemilu, maka muncullah niatan dari Angkatan Darat yang pada saat itu eksistensinya dalam politik mulai terancam, berusaha untuk menandingi kekuatan PKI dengan mendirikan sebuah organisasi yang bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya atau yang biasa disingkat menjadi Sekber Golkar pada tahun 1964.³ Adapun yang

² Usaha untuk menandingi kekuatan partai politik saingannya dengan mendirikan organisasi tandingan mulai dilakukan sejak era dominasi PKI di tahun 1964, yaitu dengan mendirikan Sekber Golongan Karya yang pada perkembangannya berubah menjadi partai Golkar dan menjadi pemenang pemilu 1971

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya, diakses pada tanggal 10 Agustus 2013

pertamakali ditunjuk untuk menjadi ketua daripada Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal Djuhartono.

Ketika kalangan Angkatan Darat di masa awal Orde Baru memutuskan untuk menghadapi partai-partai yang menjadi musuhnya di pemerintahan dalam ajang pemilihan umum, maka salah satu cara yang paling logis dan legal adalah membentuk sebuah partai yang mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka dengan cara ikut serta dalam pemilu itu sendiri. Maka, pilihan yang paling tepat pada saat itu adalah, mengembangkan Sekber Golkar menjadi partai yang mampu bersaing dengan partai-partai sipil yang selama ini menjadi saingan bagi Angkatan Darat, dan diproyeksikan mampu memenangi pemilu sehingga bisa mendominasi parlemen pada saat itu.

Dalam usahanya untuk mencapai kemenangan dalam pemilu perdana di era Orde Baru pada tahun 1971, para pemimpin partai berusaha keras untuk mencari dukungan melalui Kokarmendagri dan GUPPI (suatu gabungan usaha untuk perbaikan pendidikan Islam).⁴ Sedangkan di lapisan bawah yang dilakukan oleh pihak militer yaitu dengan cara melancarkan intimidasi terhadap para calon pemilih, khususnya yang berada di desa-desa. Adapun pihak yang cenderung menjadi sasaran empuk dari intimidasi kalangan militer adalah para bekas pendukung PKI yang menyadari bahwa mereka masih sangat rentan untuk ditahan dan diperlakukan lebih buruk apabila tidak mengindahkan kemauan pihak militer. Walaupun undang-undang pemilihan umum secara khusus melarang secara tegas

⁴ Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI), lahir pada tanggal 3 Maret 1950 di Pesantren Islam Gunung Puyuh Sukabumi Jawa Barat. GUPPI lahir karena di dorong adanya kesadaran, semangat dan idealisme beberapa tokoh Islam yang dipimpin oleh KH Sanusi, khususnya di lingkungan komunitas pendidikan Islam tradisional Jawa Barat.

bekas anggota PKI dan organisasi-organisasi masanya untuk memilih, namun pada faktanya hanya sekitar 2 juta lebih warga negara yang tidak terdaftar sebagai pemilih,⁵ sedangkan PKI pada tahun 1965 menyatakan bahwa telah memiliki anggota kira-kira 20 juta orang. Sebagai bukti paling konkret, di Jawa Tengah misalnya, pemilihan yang dilakukan di pedesaan-pedesaan diwarnai dengan pemanggilan bekas anggota-anggota PKI ke Komando Resort Militer (Koramil) dan diharuskan untuk memilih Golkar.⁶ Sedangkan di Jawa Timur, rakyat yang dikenal sebagai bekas PKI dijadikan prioritas utama yang dapat dimasukkan menjadi anggota Golkar, sementara di Blitar selatan yang dahulunya merupakan daerah PKI yang kuat dilaporkan bahwa Golkar memperoleh kemenangan mutlak.⁷ Sementara itu partai-partai lain mengeluh tentang adanya intimidasi dalam bentuk penahanan pemimpin-pemimpin lokal yang dituduh melanggar undang-undang pemilu, serta didatangi oleh pejabat-pejabat lokal dengan “diboncengi” tentara melakukan penyergapan ke rumah-rumah para aktivis partai di Jawa Tengah dalam usaha (yang tidak berhasil) mencari senjata.⁸ Di antara mereka yang ditahan selama masa kampanye pemilu dengan tuduhan yang keras yaitu terlibat dalam percobaan kudeta komunis, terdapat ketua Parmusi Jawa Tengah dan sekretaris pribadi ketua DPGR serta pemimpin NU A. Sjaichu.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan Angkatan Darat untuk memperoleh kemenangan dalam pemilu ternyata lebih efektif dari perkiraan semula dan sebagai hasilnya Golkar berhasil mencatat kemenangan telak, yaitu

⁵ *Kompas*, 26 Oktober 1971

⁶ R.W Liddle, *Evaluation From Above: National Development and Local Leadership in Indonesia*, *Jurnal Of Asian Studies*, 1973, hal.287

⁷ *Kompas*, 26 Oktober 1971

⁸ Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1986, hal. 302

dengan memenangkan sekitar 62,8 % dan berhak menguasai 236 kursi di parlemen.⁹ Sedangkan satu-satunya partai yang “mampu” mendulang suara yang cukup banyak dengan 18,7% suara.¹⁰

Terlepas dari keberhasilan Golkar memenangkan pemilihan umum, pada dasarnya Golkar adalah hasil dari ciptaan penguasa militer yang dapat dikatakan “haus kekuasaan” dan memiliki identitas yang tidak dapat dipisahkan diantara keduanya. Golkar yang tidak berlandaskan suatu organisasi partai dan tidak mempunyai akar samasekali dalam masyarakat, adalah sebuah federasi majemuk yang dimobilisasi oleh militer secara temporer dengan maksud untuk menyaingi dan memperlemah kedudukan partai-partai politik yang dianggap sebagai batu sandungan menuju kekuasaan politiknya. Karena dipandang sebagai mesin pemilihan umum yang dirancang untuk mengurangi kekuatan oposisi dan bukan untuk menciptakan pusat loyalitas serta identitas bangsa yang baru, maka Golkar tidak pernah berusaha untuk mengembangkan dirinya sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi kaum sipil ke permukaan. Filosofi awal Golkar yang hanya bertujuan untuk melegalisasikan kekuasaan politik bukanlah sebuah sarana yang memadai untuk terciptanya suatu pembangunan dan pencapaian cita-cita nasional bangsa Indonesia.

3. Korupsi di Kalangan Pejabat Militer

Kehadiran Angkatan Darat dalam setiap panggung politik dan kemudian berujung dengan penempatan mereka pada jabatan-jabatan penting yang tidak hanya menduduki posisi menteri tetapi juga hingga ke jabatan-jabatan di tingkat

⁹ M.R Karim, *Peranan ABRI dalam Politik*, Jakarta, Haji Masagung, 1989, hal.64

¹⁰ Harold Crouch, *idem*

departemen dan kepemimpinan di daerah-daerah. Jabatan yang sedemikian rupa pentingnya secara otomatis menciptakan kesempatan besar bagi terciptanya penyalahgunaan wewenang yang bisa berujung kepada tindakan korupsi.

Meskipun secara doktrin dan pengamalan sumpah sebagai militer yang selalu setia melindungi, menjaga dan mendahulukan kepentingan nasional telah dirasa cukup mempengaruhi mental sebagian perwira Angkatan Darat yang diangkat menjadi Pejabat ataupun menteri, tentu saja mereka tidak dapat terlepas dari godaan akan kebutuhan yang bersifat duniawi. Dalam usaha untuk pemenuhan kebutuhan duniawinya, tidak sedikit para pemimpin Angkatan Darat menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan dari kontrak-kontrak kredit, lisensi-lisensi untuk para rekanan bisnis, atau sesuatu sebagai ganti “komisi” atas persetujuan dagang dengan perusahaan-perusahaan asing, yang mana melibatkan mereka dalam rangka pelaksanaan tugas yang memang sudah menjadi kewajibannya. Praktek-praktek seperti ini merupakan hal yang lazim dilakukan pada kalangan perusahaan. Mereka berdalih bahwa istilah “komisi” berarti kegiatan-kegiatan lain yang agak berbeda jenisnya dengan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai tingkat rendah secara diam-diam, seperti menggelapkan uang atau menyalahgunakan dana milik pemerintah.¹¹

Berkembangnya isu-isu korupsi di kalangan perwira militer mulai menjadi sorotan publik pada tahun 1967, yang pertama kali disuarakan oleh para mahasiswa dengan dukungan dari media surat kabar yang turut membeberkan tuduhannya secara terbuka seperti *Indonesia Raya* yang dipimpin Mochtar Lubis;

¹¹ Harold Crouch., *op.cit.* hal. 329

Nusantara yang dipimpin oleh T.D Hafas; serta dua surat kabar mahasiswa seperti *Harian Kami* dan *Mahasiswa Indonesia*.¹² Dengan bertambahnya ketidakpuasan masyarakat umum terhadap pemerintah, maka pemerintah dengan terpaksa mendirikan beberapa badan yang ditugaskan untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan korupsi, walaupun paada prakteknya hanya kasus-kasus kecil yang sampai di tingkat pengadilan.

Selama periode Orde Baru sampai dengan tahun 1976 hanya ada dua Jenderal yang diadili karena kasus korupsi, yakni Brigadir Jenderal Sudarman, yang menjadi kepala BPU (Badan Pengelola Usaha) Timah yang mengelola tambang-tambang timah yang telah dinasionalisasikan sejak masa Demokrasi Terpimpin dan rupanya sang Jenderal tidak berhasil menciptakan hubungan yang harmonis dengan kelompok militer yang dominan di sekitar Suharto. Ia kemudian dituntut pada tahun 1969 dan divonis penjara dua setengah tahun. Sedangkan perwira yang lainnya adalah Mayor Jenderal Hartono Wirjodiprodo yang pernah menjadi pendukung penting Suharto dan telah naik jabatan ke posisi sebagai deputy Panglima Angkatan Darat urusan administrasi dan keuangan. Ia dituduh menyalahgunakan kedudukannya sedemikian rupa sehingga pemerintah Indonesia mendapat reputasi buruk dengan cara membantu penyelundupan senjata ke Biafra pada masa perang saudara di Nigeria,¹³ dan bahkan menurut kabar Israel juga menjadi tempat tujuan lain penyelundupan tersebut.

¹² Sebagian besar masyarakat Indonesia percaya bahwa keberanian *Indonesia Raya* dan *Nusantara* dalam menyerang para Jenderal yang dekat dengan Suharto timbul dari keyakinan bahwa mereka didukung oleh unsur-unsur yang berpikiran maju di kalangan Angkatan Darat yang tidak ingin kesatuannya di kotori oleh perilaku korup.

¹³ Perang Saudara Nigeria, juga disebut sebagai Perang Biafra, 6 Juli 1967 – 13 Januari 1970, adalah konflik politik yang terjadi antara Nigeria dan Biafra yang diakibatkan oleh usaha

Meskipun pemerintahan Orde Baru sudah berusaha untuk meyakinkan publik bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi perhatiannya yaitu dengan cara membentuk badan-badan penyelidik kasus-kasus korupsi, tetap saja kepercayaan rakyat masih rendah terhadap keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi. Rasa ketidakpercayaan yang kemudian berkembang menjadi semacam sinisme mendapat reaksi yang cukup tanggap dari pemerintah, yakni dengan membentuk semacam Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada bulan Desember 1967, di bawah pimpinan jaksa agung Sugih Arto, yang beranggotakan beberapa wartawan yang sangat kritis seperti T.D Hafas dan wakil-wakil dari kesatuan-kesatuan aksi.

Setelah berdirinya tim ini, hanya beberapa pejabat yang memiliki pengaruh kecil saja yang mampu diseret ke pengadilan pada tahun 1968. Dalam penjelasannya tentang mengapa yang dibawa ke pengadilan adalah “ikan-ikan teri”, Jaksa Sugih Arto mengatakan, “Untuk sementara kasus-kasus kakap tidak dapat diurus karena adanya masalah-masalah teknis”.¹⁴ Dalam tahun 1968 terdapat 172 kasus yang diperiksa, tetapi tidak ada yang menyangkut kalangan militer.¹⁵ Pada awal tahun 1970, oleh salah seorang deputi Sugih Arto, BrigJen Ali Said, dikatakan bahwa TPK telah menyelesaikan penyelidikan atas 144 kasus dalam tahun 1969 tetapi ia mengakui bahwa diantara kasus-kasus yang belum

pemisahan provinsi Nigeria di tenggara sebagai Republik Biafra yang merdeka. Pemerintah Nigeria dapat memenangkan perang ini.

¹⁴ *Nusantara*, 25 Januari 1968

¹⁵ *Pedoman*, 30 Januari 1969

selesai tersebut termasuk “manipulasi BE” yang menyangkut CV Waringin, Bank Dharma Ekonomi, Pertamina, Bulog dan beberapa lusin lainnya.¹⁶

Kegagalan dalam mengeksekusi kasus-kasus besar di mana terdapat beberapa perwira Angkatan Darat yang menjadi pemimpin di Perusahaan dan Instansi yang terkena kasus korupsi menjadi semacam kebiasaan yang terus berlanjut hingga di era kejatuhan Orde baru pada tahun 1998. Pengecualian terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan kalangan-kalangan tertentu baik itu berasal dari kalangan militer atau sipil menjadi semacam modus operandi yang terus menerus terjadi sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi saat ini, yang tentu saja merupakan warisan dari masa lampau yang susah dihilangkan.

B. Dampak Dalam Bidang Ekonomi

Dukungan dan keterlibatan kalangan militer dalam kebijakan pembangunan ekonomi Orde Baru yang didasarkan kepada simbiosis yang bersifat mutualisme di antara Suharto dan Angkatan Darat membawa dampak yang buruk bagi negara dan memberikan kesempatan bagi perwira-perwira militer untuk mengumpulkan kekayaan pribadi. Eksploitasi sektor ekonomi yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran belanja angkatan bersenjata yang dirasa masih kurang jika hanya mengandalkan anggaran belanja negara ternyata menjadi semacam blunder besar bagi Orde Baru, karena banyak perusahaan-perusahaan besar –beberapa diantaranya adalah BUMN- seperti Pertamina justru merugi akibat praktek-praktek tersebut.

¹⁶ *Kompas*, 3 Februari 1970

1. Eksploitasi Sektor Ekonomi Untuk Kepentingan Pembiayaan Angkatan Bersenjata

Kebijakan pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru yang bertujuan untuk memperbaiki kemerosotan ekonomi yang merupakan warisan Orde Lama, sesungguhnya bertujuan baik dan berasaskan kepentingan nasional yang tentu saja mengakomodasi terciptanya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia pada umumnya. Idealisme pembangunan ekonomi ternyata tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal, karena hanya mengakomodasi kepentingan sepihak saja, yakni golongan militer yang dilibatkan dalam program pembangunan tersebut. Kesempatan bagi kalangan militer untuk mengeksploitasi sektor ekonomi memang tidak terlepas dari peranan pemerintah yang membiarkan praktek-praktek tersebut demi mencukupi kebutuhan pendanaan bagi angkatan bersenjata, khususnya dari Angkatan Darat yang memang paling dominan dari angkatan yang lainnya.

Seperti yang telah diketahui bahwa perwira-perwira militer menjalankan praktek sistem ekonomi inkonvensional dalam usahanya mengumpulkan dana atas nama kepentingan Angkatan Darat. Pada tingkat tertinggi, perusahaan-perusahaan raksasa seperti perusahaan minyak negara (Pertamina), badan pembelian bahan makanan milik negara (Bulog) dan suatu perusahaan perdagangan umum raksasa (sejenis BUMN), dipegang oleh beberapa perwira senior Angkatan Darat. Di samping itu, banyak perusahaan didirikan untuk memenuhi kebutuhan dana kesatuan-kesatuan militer dan seksi-seksinya, demikian pula aturan yang sama dikenakan di daerah-daerah tempat perwira-

perwira militer berkecimpung di berbagai kegiatan perdagangan. Tugas utama para “pengusaha militer” ini adalah menjamin pengaliran dana yang tetap ke kas Angkatan Darat tanpa menimbulkan kekacauan ekonomi. Metode yang dipakai diserahkan kepada kebijakan masing-masing personal, walaupun memang tetap diminta untuk menghindarkan eksese-eksese yang akan merusak citra Angkatan Darat secara khusus. Sebagai imbalannya, para perwira militer diperkenankan menuai sebagian hasilnya untuk balas jasa, dengan ketentuan tidak mengambil terlalu banyak. Dalam menjalankan operasi-operasinya, perusahaan-perusahaan yang disponsori oleh militer ini sering diberi perlakuan khusus oleh para perwira yang memegang jabatan-jabatan kunci dalam pemerintahan.

Salah satu sumber dana terpenting bagi Angkatan Darat pada tahap awal pemerintahan Orde Baru adalah perusahaan minyak negara, Pertamina. Dalam tahun-tahun 1960-an, minyak merupakan sepertiga penghasilan ekspor dan sesudah kenaikan harga pada tahun 1973 dan 1974 menjadi dua pertiga.¹⁷ Jadi dapat dibayangkan seberapa besar anggaran gelap yang dapat diperoleh Angkatan Darat dari “mengemplang” hasil ekspor minyak tersebut, belum lagi dari sektor-sektor yang lain. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Pertamina berhasil mengadakan kesepakatan-kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan lain di luar negeri, seperti Caltex, Stanvac dan Shell, kesempatan tersebut turut dijadikan para perwira militer untuk mengeruk keuntungan dengan kedok penyerahan konsesi oleh ketiga perusahaan besar tersebut. Dalam pengelolaannya, Pertamina yang notabene merupakan perusahaan milik pemerintah, namun dalam prakteknya

¹⁷ Harold Crouch., *op.cit.*, hal.310

bekerja sebagai perusahaan swasta yang dijalankan oleh seorang perwira militer, yang bertanggung jawab hanya kepada pimpinan militernya saja, meskipun dalam birokrasinya harus bertanggung jawab kepada menteri pertambangan, tetapi perwira tersebut mengklaim bahwa ia memiliki otonom penuh atas sikapnya itu.

Dalam kasus lain yang melibatkan Bulog (Badan Urusan Logistik) dalam usaha pengumpulan dana bagi militer, ternyata juga terjadi banyak penyimpangan dan pengemplangan dana. Sebagai salah satu badan negara, Bulog tentunya dibiayai oleh anggaran belanja negara, yang dalam hal ini pendanaannya dikururkan oleh Bank Indonesia, yang juga sekaligus menjadi sumber dana bagi operas-operasi Bulog. Menurut penyelidikan resmi yang dilakukan oleh Komisi Empat yang meneliti korupsi pada tahun 1970,¹⁸ Bulog tidak pernah memberikan laporan yang memuaskan tentang penggunaan kredit dan transaksi-transaksi keuangan yang lainnya.¹⁹ Kondisi yang demikian membuat Bulog dengan cepat dikenal umum sebagai “lahan basah” dan pusat korupsi bagi para perwira militer yang menjadi pimpinannya.

Ketika usaha kalangan militer untuk meningkatkan pendanaan bagi angkatan bersenjata dengan cara praktik-praktik yang bersifat inkonvensional terhadap beberapa badan negara seperti Pertamina, Bulog dll, mulai terendus publik dan cenderung kurang begitu efektif, karena banyak “dikemplang” oleh para perwira militer yang menjadi pejabat untuk kepentingan pribadi, dan tentu saja berdampak buruk bagi citra militer, maka muncul lagi beberapa ide kreatif misalnya mendirikan beberapa yayasan dan perusahaan yang kemudian menjadi

¹⁸ Komisi dari DPR yang secara khusus menyelidiki beberapa kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota militer

¹⁹ *Sinar Harapan*, 22 Juli 1970

mitra bagi pemerintah dan mengerjakan proyek-proyek penting dalam skala besar. Selain mendirikan perusahaan, muncul juga semacam ide yang cukup ekstrim, misalnya seperti yang dilakukan oleh suatu yayasan Kepolisian yang menyelenggarakan adu kerbau di Jakarta sekitar tahun 1969.²⁰ Sebagian besar usaha yang disponsori militer ini dilaksanakan oleh para pengusaha Cina dengan rekanan tentara yang menjamin bahwa lisensi-lisensi dan fasilitas-fasilitas akan disediakan. Pihak militer juga menyediakan perlindungan bagi tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar hukum. Dengan demikian akan lebih sulit untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan yang terkait dengan pengusaha-pengusaha Cina tersebut, karena militer menjadi *backing* bagi semua kegiatan mereka dan dari kasus semacam ini dapat dilihat dengan jelas kebobrokan dalam internal militer Indonesia yang telah melebarkan sayapnya dengan senjata Dwifungsi ABRI-nya.

Pada tahun 1970-an ketergantungan angkatan bersenjata sumber-sumber “tak lazim” mulai berkurang, hal ini terkait dengan keberhasilan pemerintah menaikkan penghasilan “lazim” melalui sektor perpajakan. Anggaran “resmi” Angkatan Darat misalnya bertambah tiga kali lipat antara tahun 1969 dan 1973,²¹ dan kemudian naik secara tajam pada tahun-tahun berikutnya.²² Pada akhir tahun 1960-an gaji seorang mayor jenderal tidak lebih dari Rp 15.000 (kira-kira 40 dollar AS) per bulan, tetapi pada tahun 1975 naik menjadi lebih dari Rp 100.000;

²⁰ Harold Crouch., *op.cit.*, hal.320

²¹ *Nusantara*, 18 Januari 1973 (diterjemahkan dalam *Indonesian Current Affairs Translation Service*)

²² Turut didorong dengan adanya kenaikan harga minyak yang berdampak pada penerimaan negara yang secara umum, naik secara luar biasa.

kenaikan serupa juga dialami oleh berbagai macam tingkatan prajurit.²³ Walaupun kebutuhan untuk kesatuan-kesatuan militer dan para perwira secara personal yang bergantung pada sumber-sumber inkonvensional berkurang, namun kebiasaan lama pantang berhenti. Dengan tidak adanya perlawanan dari kelompok-kelompok politik di luar kalangan militer, maka mereka akan terus menggunakan kedudukan-kedudukannya dalam pemerintah untuk melanjutkan kepentingan usaha-usaha pribadi mereka.

2. Eksploitasi Sektor Ekonomi Untuk Kepentingan Pribadi Para Perwira.

Ketika keterlibatan para perwira militer dalam sektor ekonomi dimanfaatkan untuk meningkatkan pendanaan bagi kepentingan angkatan bersenjata, maka salah satu konsekuensinya adalah orientasi komersial yang kemudian marak terjadi di kalangan perwira tersebut. Mereka mendapatkan ketrampilan mencari uang yang mulanya digunakan atas nama kepentingan kesatuan, tetapi kemudian secara berangsur-angsur berubah atas nama kepentingan pribadi. Jika sebelumnya mereka terpaksa terjun ke bidang usaha karena didesak oleh kebutuhan, dalam waktu singkat mereka mampu menyesuaikan diri dengan tanggung jawab baru. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, banyak diantara para anggota militer ini yang lebih suka berhubungan dengan para pengusaha Cina dan asing lainnya daripada memimpin pasukan di lapangan. Etos komersial dengan cepat menjalar keluar dari perwira-perwira yang langsung berurusan dengan kepemimpinan perusahaan-perusahaan afiliasi angkatan bersenjata.

²³ Booth, Anne dan B. Glassburner, "Survey Of Recent Development", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 1975, hal. 19

Salah satu bentuk keterlibatan para perwira-perwira militer dalam usaha memperkaya diri terlihat jelas ketika mereka memanfaatkan hubungan yang terjalin dengan para penanam modal asing. Hal ini sendiri tidak terlepas dari dikeluarkannya Undang-undang penanaman modal asing pada tahun 1967 yang membuka jalan bagi masuknya modal asing secara cepat yang kemudian semakin melimpah pada tahun 1970-an. Pada tahun 1971 hanya terjadi penanaman modal (diluar sektor perminyakan) sebesar 222 juta dolar AS, tetapi pada tahun 1973 meningkat menjadi hampir satu milyar dolar AS dan penanaman modal Jepang telah melampaui Amerika Serikat. Pengaturan yang khas yang biasa dilakukan adalah bahwa penanaman modal itu berbentuk usaha patungan dengan pihak Indonesia yang terdiri dari kongsi antara para perwira senior dengan pengusaha Cina.

Kegiatan-kegiatan komersial perwira-perwira senior Angkatan Darat dan sekutu-sekutu usaha mereka dari kalangan Cina sering menimbulkan apa yang disebut sebagai “ekses-ekses” oleh pihak penguasa. Ekses yang paling menyolok adalah “skandal BE” pada tahun 1968. Kesempatan penyelewangan terjadi karena besarnya perbedaan antara harga yang dibayar importir untuk devisa yang berasal dari negara-negara lain, dengan devisa-devisa yang diambil dari sumber-sumber lain misalnya dari ekspor. Devisa yang berasal dari bantuan (yang dikenal dengan BE) dijual kepada importir dengan harga yang rendah, tetapi penggunaannya terbatas pada impor barang-barang yang diprioritaskan, sedangkan devisa dari sumber-sumber lain yang dapat digunakan untuk tujuan apapun dijual dengan harga yang lebih tinggi. Pada tahun 1968 sejumlah importir yang punya hubungan

baik dengan pemerintah membeli BE untuk mengimpor barang-barang yang terdapat dalam daftar prioritas, tetapi setelah memalsukan dokumen-dokumen pengangkutan yang diperlukan, tidak mengimpor barang-barang tersebut. Dolar yang didapat dengan harga BE yang rendah itu lalu digunakan untuk mengimpor barang-barang konsumtif lainnya yang lebih menguntungkan, yang tentu saja tidak tercantum dalam daftar prioritas atau dijual kembali di Jakarta dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Ketika praktek kecurangan tersebut diungkap oleh menteri perdagangan yang baru diangkat, Sumitro pada bulan Agustus, Jaksa Sugih Arto memperkirakan bahwa jumlah kredit yang disalahgunakan antara Juni hingga Agustus berjumlah sekitar 35 juta Dollar AS atau kira-kira sepertiga dari jumlah devisa yang dialokasikan untuk sektor impor dalam periode tersebut. Ia mengakui bahwa praktek semacam ini tentu sudah dimulai jauh sebelumnya, sementara itu pihak lain memperkirakan bahwa jumlah yang telah disalahgunakan mencapai angka 100 juta Dollar AS.²⁴ Angka ini kemudian dibandingkan dengan 350 juta Dollar AS yang telah dikeluarkan oleh negara-negara lain pada tahun 1968, di antaranya 275 juta Dollar AS yang berbentuk bantuan neraca pembayaran melalui program BE.²⁵

Skandal BE tersebut bukan saja berjumlah luar biasa besar akan tetapi juga menyangkut bantuan yang diberikan oleh negara-negara lain. Dengan demikian harus diambil tindakan untuk memberikan jaminan kepada kreditor-kreditor luar negeri bahwa bantuan tidak akan disalahgunakan lagi. Tiga puluh lima importir

²⁴ *Berita Yudha*, 1 Oktober 1968

²⁵ Harold Crouch., *op.cit*, hal. 323

yang ternyata semuanya berasal dari Cina kemudian dicoret dari daftar dan Jaksa Sugih Arto menjatuhkan larangan sementara bagi semua pengusaha Cina untuk meninggalkan Indonesia. Walaupun demikian, dengan tindakan-tindakan yang telah diambil ini ia mengumumkan bahwa hanya satu diantara importir-importir “nakal” tersebut yang telah berhasil ditangkap pada pertengahan bulan September, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri.²⁶ Walaupun dalam berbagai laporan telah dinyatakan beberapa pejabat pemerintah pada waktu itu telah ditahan, tetapi tak seorangpun yang pernah dituntut dan diadili oleh pengadilan, begitu juga para importir.²⁷ Namun demikian pada tahun 1970 Sugih Arto mengumumkan bahwa telah tercapai “penyelesaian secara damai” dan bahwa tujuh dari manipulator-manipulator dana yang tidak disebutkan namanya, yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan sejumlah 22, 1 juta dollar AS dari total 35 juta dollar AS telah setuju untuk mengimpor barang-barang yang ada dalam daftar prioritas dan bernilai sama dengan itu serta mau membayar denda sejumlah Rp 25 atau 6 sen untuk tiap dolar yang disalahgunakan.²⁸ Banyak orang berpendapat bahwa alasan utama tidak dihadapkannya para manipulator dana tersebut ke pengadilan adalah karena kebanyakan dari mereka mempunyai hubungan dagang dengan para pejabat dari kalangan tentara.

Perilaku-perilaku menyimpang para perwira militer dalam mengelola sektor-sektor ekonomi terjadi hampir di banyak sektor. Sebagai contoh, para perwira yang diangkat ke posisi-posisi dalam birokrasi lalu terlibat kerjasama dengan para rekanan pengusaha Cina dalam kegiatan-kegiatan perusahaan pribadi

²⁶ *Nusantara*, 16 September 1968

²⁷ Harold Crouch, *op.cit.*, hal.324

²⁸ *Kompas*, 11 Februari 1970, 25 Juli 1970. Kurs ketika itu satu dollar AS sama dengan Rp.376

sedangkan para panglima daerah militer (Pangdam) sering memiliki sumber-sumber dana pribadi. Para pimpinan militer, khususnya Angkatan Darat, tidak memperhatikan tanda-tanda ketidaksetujuan terhadap kecenderunganyang terjadi. Sebaliknya dianut pandangan bahwa adalah biasa bagi para pejabat untuk menggunakan kedudukan resminya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagaimana terjadi bahwa, ditempat para pejabat memperoleh pendapatan yang lebih banyak dari berbagai keuntungan dibandingkan dengan gaji, demikian pula para perwira militer diharapkan dapat memanfaatkan kedudukan mereka sebaik-baiknya dalam birokrasi dan pemerintahan yang lain dan ini sering dipandang sebagai tindakan balas jasa bagi kesetiaan yang telah ditunjukkan sebelumnya. Tindakan balas jasa ini sendiri mempunyai syarat yang cukup lunak, yaitu, asalkan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka tidak akan nada keberatan bila mereka memperkaya diri disamping melakukan tugas yang diamanatkan oleh kesatuaanya. Hal ini sendiri dibuktikan ketika terjadi pemberantasan terhadap korupsi yang mulai dilakukan diakhir era 1960-an, hanya sedikit dari para pejabat militer yang terjaring oleh hukum, itupun dikarenakan pejabat militer yang bersangkutan tidak dilindungi lagi oleh atasannya.²⁹

Para perwira yang bertugas dalam lembaga-lembaga yang melakukan pembelian-pembelian besar sudah terbiasa untuk meminta komisi dari para penyedia. Hal yang sama dirasa sebagai hal yang normal untuk menerima komisi dari para peserta lelang tender untuk kontrak –kontrak yang dibuat, khususnya industri bangunan, dan bukan hal aneh apabila di lapangan banyak ditemukan

²⁹ Kondisi ini terjadi apabila pejabat militer yang bersangkutan tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan golongan yang dekat pada Suharto, atau bisa juga terjadi apabila yang bersangkutan tidak berhati-hati dalam melakukan praktek memperkaya diri tersebut.

perusahaan-perusahaan bangunan yang dimiliki oleh keluarga pejabat militer tadi, bahkan para istri-istri perwira tadi juga turut aktif dalam dunia komersial. Maka bukan menjadi hal yang aneh pula, apabila kemudian tingkat korupsi semakin meningkat dan cenderung tak mampu disentuh oleh hukum, karena dengan “strategi perangnya yang ampuh, yaitu mengepung dari berbagai penjuru”, akhirnya kekuatan lembaga pemberantasan korupsi yang sempat dibentuk oleh pemerintah kemudian kalah telak dan “menyerah tak berdaya” dalam menuntaskan berbagai kasus yang melibatkan anggota militer.

C. **Dampak dalam Bidang Militer: Terjadinya Persaingan dalam Tubuh Militer**

Pada masa-masa awal kekuasaan Orde Baru, salah satu hal pokok yang menjadi perhatian Suharto adalah memperkuat kekuasaannya atas angkatan bersenjata. Peran daripada angkatan bersenjata sendiri pada masa-masa tersebut ialah membantu Suharto melakukan tindakan “pembersihan” terhadap lawan-lawan dan calon-calon lawan politiknya sekaligus. Ketika proyek pembersihan tersebut sudah terlaksana, maka langkah terakhir Suharto adalah membersihkan angkatan bersenjata khususnya Angkatan Darat dari unsur-unsur Sukarno maupun unsur-unsur yang ekstrim anti-Sukarno, pembersihan ini kemudian berlanjut kepada pengurangan otonomi ketiga angkatan yang lain (Angkatan Laut, Udara dan Kepolisian). Proses pembersihan ini kemudian menjadi benar-benar tuntas ketika telah terjadi integrasi penuh angkatan bersenjata di bawah satu komando tunggal pada akhir tahun 1969. Sejak saat itu semua posisi komando, baik dalam tubuh Angkatan Darat – yang dianakemaskan oleh Suharto – maupun angkatan

yang lain, diisi dengan perwira-perwira yang diangkat sejak tahun 1966. Dalam mengokohkan kekuasaannya atas angkatan bersenjata, Suharto lebih banyak bersandar pada kekuatan-kekuatan pelindungnya (kelompok yang loyal) daripada kemampuannya untuk memaksa.³⁰

Dalam memimpin pemerintahannya, Suharto sangat bergantung pada sekelompok kecil penasihat yang diangkat dari kalangan Angkatan Darat. Dalam tahun 1966, Suharto membentuk staf pribadi (Spri), terdiri dari para perwira Angkatan Darat yang berkembang dari 6 orang menjadi 12 orang dalam tahun 1968. Staf pribadi tersebut dipimpin oleh MayJen Alamsjah, para anggota Spri tadi, kemudian terbagi ke dalam berbagai divisi yang masing-masing mengurus masalah-masalah seperti; keuangan, politik, intelijen luar negeri, intelijen dalam negeri, kesejahteraan sosial dan pemilihan umum, serta satu divisi lagi yang tergabung dalam urusan khusus.³¹ Tujuan pembentukan Spri ini memang sangat menguntungkan kalangan Angkatan Darat, dengan keberhasilannya mempengaruhi setiap keputusan dan arah kebijakan politik pemerintah maka bisa memberikan kesempatan bagi mereka meminta lebih banyak lagi kompensasi kepada Suharto. Dalam perkembangannya, ketika Spri dinilai oleh banyak kalangan terutama rakyat dan mahasiswa, terlalu mendominasi pemerintah dibandingkan badan yang seharusnya membantu presiden, maka badan ini kemudian dibubarkan dan diganti lagi dengan asisten pribadi (Aspri).

Banyaknya perwira Angkatan Darat yang dijadikan pembantu dan penasihat dalam berbagai bidang oleh Suharto ternyata menimbulkan semacam friksi di

³⁰ Harold Crouch, *op.cit.*, hal. 346

³¹ *Kompas* 13 Juni 1968

dalam tubuh bersenjata. Konflik yang terjadi akibat persaingan diantara penasihat-penasihat yang dekat kepada Suharto dengan kelompok-kelompok nonpenasihat yang saling memperebutkan kedudukan dalam tubuh golongan elite tadi. Kondisi seperti ini kemudian meluas kepada perebutan di antara perwira militer terkait penguasaan atas sumber-sumber ekonomi yang dianggap sangat berpotensi menguntungkan siapa saja yang berhasil menguasainya. Sebagai usaha untuk mengurangi friksi dalam tubuh angkatan bersenjata, maka sekali lagi badan semacam Aspri kemudian dibubarkan untuk mencegah perpecahan yang lebih besar lagi, yang tentu saja dapat membahayakan keberlangsungan pemerintahan Orde Baru. Dengan demikian maka sesungguhnya kebijakan pemerintah yang menjadikan golongan militer sebagai mitra utama mulai dari bidang politik hingga ekonomi ternyata malah menambah permasalahan lagi, yang tentu saja secara kepentingan nasional membuat masyarakat Indonesia menjadi kehilangan banyak hak, baik itu terlibat aktif dalam politik maupun terlibat langsung dalam mengelola sumber ekonomi.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Orde baru dalam menjamin hak semua pihak tidak mencapai hasil yang optimal karena, jangankan untuk rakyat, di antara kalangan militer saja sudah terjadi perebutan, sehingga mustahil rakyat sipil akan memperoleh bagian yang cukup, sehingga dapat dikatakan peran sipil dalam menentukan kebijakan politik dan ekonomi adalah pasif. Kekalahan sipil dalam memperebutkan pengaruh dengan kalangan militer pada masa Orde Baru, membuat kalangan sipil menjadi “paranoid” dengan kondisi yang demikian, terbukti ketika pemerintahan Orde Baru berhasil dijatuhkan, sebagian rakyat turut

menyalahkan militer sebagai “biang kerok” penderitaan masyarakat terkait masa-masa krisis di awal era 1990-an. Dominasi militer dalam pemerintahan kemudian benar-benar bisa di hilangkan ketika pada akhirnya pada era Reformasi muncul peraturan perundang-undangan yang berhasil mengembalikan fungsi militer ke bentuk yang semula yaitu sebagai kekuatan utama dalam bidang Hankam.



BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan jawaban dari permasalahan yang telah diuraikan dalam bab II, III, dan IV, maka dapat disimpulkan :

1. Proses munculnya Dwifungsi ABRI dalam pemerintahan Orde Baru merupakan hal yang lumrah dan memang sudah sewajarnya demikian. Hal ini tidak terlepas dari *background* yang dimiliki oleh militer itu sendiri, di mana sejak masa-masa awal kemerdekaan mereka sudah terbiasa dengan tugas-tugas yang tidak hanya terkait dengan fungsi Hankam, namun sudah terbiasa juga dengan tugas-tugas sipil. Dengan kata lain, militer memang sudah sejak dari awal lahirnya sudah “men-dwifungsikan” dirinya. Kondisi ini juga yang terus berlanjut ketika Orde Baru mulai menggusur dominasi Orde Lama, yang mana dalam prosesnya sangat mengandalkan kekuatan-kekuatan militer, terutama kekuatan dari Angkatan Darat. Relasi yang sedemikian rupa membuat pemerintahan Orde Baru dengan militer yang didominasi oleh Angkatan Darat membuat keduanya dikenal sebagai duet maut yang selalu berdampingan dalam menghadapi musuh-musuh politiknya, bahkan militer merupakan tangan kanan dan merupakan tempat bagi pemimpin Orde Baru pada saat itu untuk meletakkan kepercayaannya, sehingga tidak akan aneh apabila ditemukan banyak sekali

perwira-perwira yang diangkat menjadi menteri yang mengurus departemen-departemen terpenting di kabinet.

2. Peranan militer yang sangat vital dan berkedok dwifungsi ABRI-nya, merupakan senjata terampuh yang dimiliki oleh Orde Baru dalam memenangkan dominasi politik atas partai-partai yang dianggap menghalangi “pembangunan nasional” pada masa itu. Selain dalam bidang politik, dominasi dalam sektor-sektor perekonomian juga menjadi milik para perwira militer yang ditempatkan untuk memimpin badan-badan yang dimiliki oleh negara. Dalam menjalankan fungsi politiknya, kalangan militer bahkan membuat sebuah terobosan yang sangat radikal, yakni dengan mendirikan Sekber Golkar yang kemudian menjadi partai Golkar. Pendirian partai ini ternyata memang sangat tepat dan menguntungkan rezim Orde Baru, karena melalui partai inilah kepemimpinan Suharto sanggup bertahan selama lebih kurang 30 tahun. Dalam menjalankan fungsi ekonomi kalangan militer juga mendapatkan berbagai keuntungan, diantaranya; mampu menambah pendanaan bagi operasional angkatan bersenjata (dana APBN dirasa masih sangat kurang), “pengemplangan” dana dari sektor-sektor ekonomi milik negara ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga terlihat oleh publik bahwa anggaran belanja negara untuk bidang Hankam telah dilaksanakan dengan begitu efektif dan sekaligus memberikan citra positif bagi pemerintah sendiri.

3. Keterlibatan militer yang didukung oleh doktrin Dwifungsi ABRI-nya dalam bidang sosial-politik dan ekonomi, membawa banyak dampak buruk yang tidak hanya merugikan negara dana bangsa, tetapi juga berdampak negatif bagi tubuh angkatan bersenjata. Dampak yang terjadi dalam bidang sosial-politik misalnya, dibatasinya pergerakan partai-partai politik dalam partisipasi pemerintahan, dalam bidang sosial, terjadi kemerosotan moral para pejabat militer yang banyak melakukan korupsi ketika diberi kepercayaan oleh Orde Baru untuk menguasai sektor ekonomi, sedangkan dampak yang paling terakhir adalah bagi suasana dalam tubuh angkatan bersenjata yang mengalami banyak persaingan dan perebutan pengaruh untuk bisa mendapatkan kepercayaan Suharto agar bisa ditempatkan dalam jabatan pemerintahan dan penguasaan atas sektor ekonomi. Dampak-dampak negatif tadi terus saja hadir sepanjang masa pemerintahan Orde Baru, karena permasalahan tersebut yang telah menjalar dan mengakar dalam sistem pemerintahannya. Kondisi ini kemudian berangsur-angsur mulai menghilang ketika Orde Baru berhasil dijatuhkan dan untuk kasus korupsi memang sangat jarang ditemukan perwira militer yang terlibat di dalamnya di masa reformasi ini, karena pada masa reformasi posisi yang dominan mulai jatuh ke tangan-tangan sipil dan politisi-politisi sipil-lah yang kemudian banyak melakukan tindakan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku

Booth, Anne, dan Bruce Glassburner, *Survey of Recent Developments : Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 1975

Crouch, Harold, *Militer dan Politik di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1986

Jahja Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta, Fak. Sospol UGM, 1973

Kardiyat Wiharyanto. A, *Sejarah Indonesia.dari Proklamasi sampai Pemilu 2009*, Universitas Sanata Dharma, 2011

Kartini Kartono, *ABRI dan Permasalahannya: Pemikiran Reflektif Peranan ABRI di Era Pembangunan*, Mandar Maju, 1996

Leo Suryadinata, *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Suharto*, LP3ES, Jakarta, 1996

Nugroho Notokusanto. *Pejuang Dan Prajurit*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985.

Rusli Karim.M, *Peranan ABRI dalam Politik*, Haji Masagung, Jakarta, 1986

Sundhaussen, Ulf, *The Political Orientation and Political Involvement of the Indonesian Officer Corps, 1945-1966 : The Siliwangi Division and The Army Headquarters*. (Thesis Ph.D Monash University), 1971

Tinker, Irene, dan Milidge Walker, *Planning for Regional Development in Indonesia, Asian Survey*, 1971

b. Sumber Koran

Kompas, 16 Juni 1968

_____,31 Februari 1970

_____, 26 Oktober 1971

Nusantara, 25 Januari 1968

_____, 22 Juli 1970

Pedoman, 30 Januari 1969

c. Sumber Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya, diakses pada tanggal 10 Agustus 2013



LAMPIRAN



Tabel.1. Jumlah Anggota ABRI yang Ditempatkan di Luar Bidang Hankam/ABRI.¹

NO	Jabatan/Penggolongan	JUMLAH	
		1977 (Mei)	1980) Nov
	Pusat Pemerintahan		
1	Menteri, Pimpinan lembaga tinggi Negara	17 (42,5%)	19 (47,5%)
2	Sekretaris Jenderal	14 (73,6%)	14 (73,6%)
3	Inspektur Jenderal	18 (29,5%)	18 (29,5%)
4	Direktur jenderal	15 (78,9%)	15 (78,9%)
5	Kepala/ketua lembaga non-departemen	8 (44,4%)	8 (44,4%)
6	Sekretaris menteri, asisten menteri (setingkat)	21 (84%)	21 (84%)
	Jumlah	76 (53,5%)	76 (53,5%)
	Kepala Daerah		
7	Gubernur	19 (70,3%)	19 (70,3%)
8	Bupati	136 (56,4%)	137 (56,6%)

¹ Nugroho Notosusanto, *Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*, Jakarta, Sinar Harapan, 1985, hal. 378

9	Walikota	19 (31,6%)	20 (33,3%)
Luar Negeri			
10	Duta besar	24 (41%)	28 (44,4%)
11	Kuasa Usaha	1 (50%)	1 (50%)
12	Konsul jenderal	4 (25%)	4 (25%)
13	Konsul RI	2 ((9,5%)	2 ((9,5%)
	Jumlah	31 (31,9%)	35 (34,3%)
Pengolongan			
14	Penugaskaryaan		8725
15	Penyaluran		7031
16	Perbantuan		1071
	Jumlah		16830

	Status		
17	Aktif	8715	6199
18	MPP	12405	1957
19	Pensiun		8674
	Jumlah	21118	16830
20	Legislatif	1806	1480
21	Eksekutif	19312	10203
	Sumber		
22	Angkatan Darat	17004	12873
23	Angkatan Laut	926	823
24	Angkatan Udara	689	777
25	Kepolisian	2490	2357

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SILABUS

Nama Sekolah	: SMA Suryamandala Barong Tongkok
Program	: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Mata Pelajaran	: Sejarah
Kelas/Semester	: XII / 1
Tahun Ajaran	: 2013/2014
Standar Kompetensi	: 3.8 Mengevaluasi perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan pada masa Orde Baru dan Reformasi.

NO	Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1	1. Merekonstruksi perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan pada masa Orde Baru dan Reformasi,menyajikan dalam	Dwifungsi ABRI : Legalisasi Kekuasaan golongan militer dalam pemerintahan Orde Baru. <ol style="list-style-type: none"> a. Proses munculnya Dwifungsi ABRI b. Pelaksanaan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru 	Mengamati: <ul style="list-style-type: none"> • Membaca buku teks dan melihat tayangan foto dan gambar-gambar kehidupan politik, ekonomi dan sosial pada era Orde Baru yang berkaitan langsung dengan dominasi kekuasaan militer melalui kekuatan Dwifungsi ABRI-nya. 	Tugas: Membuat hasil kajian kelompok/individu dalam bentuk tulisan tentang keterlibatan/dominasi golongan militer pada masa Orde Baru dengan dukungan Dwifungsi ABRI-	2 x 45 Menit	<ul style="list-style-type: none"> • Crouch, Harold, <i>Militer dan Politik di Indonesia</i>, Sinar Harapan, Jakarta, 1986 • Nugroho Notosusanto. <i>Pejuang Dan Prajurit</i>, Sinar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>bentuk tulisan.</p>	<p>c. Dampak Pelaksanaan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melihat tayangan power point mengenai materi tentang legalisasi kekuasaan yang dilakukan oleh golongan militer melalui doktrin dwifungsi ABRI-nya. <p>Menanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menanya dan berdiskusi untuk mendapatkan klarifikasi dan pendalaman pemahaman mengenai keterlibatan militer melalui Dwifungsi ABRI dalam pemerintahan Orde Baru yang berdampak secara langsung dalam perkembangan politik, ekonomi dan sosial. <p>Mengeksplorasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan informasi dan data lanjutan terkait dengan pertanyaan dan materi tentang keterlibatan golongan militer dengan Dwifungsi ABRI-nya dalam pemerintaha Orde Baru, melalui bacaan, media gambar dan sumber-sumber lainnya yang 	<p>nya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana proses munculnya Dwifungsi ABRI b. Bagaimana pelaksanaan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru. c. Apa dampak yang terjadi akibat pelaksanaan Dwifungsi ABRI dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. <p>Observasi: Mengamati kegiatan peserta didik dalam proses mengumpulkan data, analisis data dan pembuatan laporan.</p>	<p>Harapan, Jakarta, 1985.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rusli Karim.M, <i>Peranan ABRI dalam Politik</i>, Haji Masagung, Jakarta, 1986 • Kardiyat Wiharyanto. A, <i>Sejarah Indonesia.dari Proklamasi sampai Pemilu 2009</i>,Universitas Sanata Dharma, 2011 • Jahja Muhaimin, <i>Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966</i>,Yogyakarta, Fak. Sospol UGM, 1973 <p>Alat dan Bahan: Alat : <i>LCD,OHP</i>, Kartu Soal, Gambar,dan Papan tulis. Bahan :</p>
--	------------------------	---	--	---	--

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

			<p>mendukung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan beberapa tulisan yang terkait dengan materi sejarah terbentuknya militer (TNI) . <p>Mengasosiasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi informasi dan data-data yang didapat dari berbagai sumber (buku dan internet) tentang dominasi golongan militer dalam bidang politik, ekonomi dan sosial pada masa Orde Baru, untuk didiskusikan dalam kelompok. • Menganalisis keterkaitan antara dampak yang ditimbulkan dari dominasi golongan militer dengan kehidupan masyarakat sekarang. <p>Mengomunikasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan hasil rekonstruksi dalam bentuk tulisan dan presentasi tentang perkembangan politik, ekonomi dan sosial pada masa Orde baru yang sangat didominasi oleh 	<p>Portofolio: Menilai laporan tertulis hasil rekonstruksi tentang perkembangan politik, ekonomi, dan sosial pada masa Orde Baru yang telah didominasi oleh golongan militer melalui doktrin Dwifungsi ABRI.</p> <p>Tes: Menilai kemampuan peserta didik dalam merekonstruksi materi tentang Dwifungsi ABRI : Legalisasi kekuasaan golongan militer pada masa pemerintahan Orde Baru.</p>	<p><i>Power point, Kertas transparansi, Kertas, Spidol, dan Kapur tulis.</i></p>
--	--	--	---	---	--

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

			<p>golongan militer melalui doktrin Dwifungsi ABRI-nya.</p> <ul style="list-style-type: none">• Membuat laporan tertulis secara personal melalui hasil presentasi kelompok dan studi pustaka tentang dampak dari dominasi golongan militer dalam pemerintahan Orde Baru dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial dan militer.			
--	--	--	---	--	--	--

Kepala Sekolah

Hawel, S.pd., M.M
NIP :

Yogyakarta, 20 Februari 2014
Guru Mata Pelajaran

Andreas Lantik

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Satuan Pendidikan	: SMA Suryamandala Barong Tongkok
Kelas/ Semester	: XII /1
Mata Pelajaran	: Sejarah Indonesia
Materi Pokok	: Dwifungsi ABRI : Legalisasi Kekuasaan golongan militer dalam pemerintahan Orde Baru.
Pertemuan ke	: 1
Alokasi waktu	: 2 X 45 menit (90 Menit)

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

- Merekonstruksi perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan pada masa Orde Baru dan Reformasi, menyajikan dalam bentuk tulisan.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

- 1.1 Mensyukuri segala karunia yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa atas masa reformasi yang menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.
- 2.1 Menunjukkan perilaku bertanggung jawab, bisa berkerjasama, santun dan pro-aktif dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran sejarah.
- 3.1 Mengidentifikasi proses munculnya Dwifungsi ABRI pada masa pemerintahan Orde Baru.
- 3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan Dwifungsi ABRI pada masa pemerintahan Orde Baru.
- 3.3 Mengidentifikasi dampak dari pelaksanaan Dwifungsi ABRI pada masa pemerintahan Orde Baru.
- 4.1 Menulis makalah rekonstruksi tentang perkembangan politik, ekonomi, dan sosial pada masa Orde Baru yang telah didominasi oleh golongan militer melalui doktrin Dwifungsi ABRI.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Menunjukkan sikap syukur dan taat terhadap ajaran agama
2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab, kerjasama, santun dan pro-aktif dalam kegiatan kelompok.
3. Siswa dapat mengidentifikasi proses munculnya Dwifungsi ABRI pada masa pemerintahan Orde Baru.
4. Siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan Dwifungsi ABR pada masa Orde Baru.
5. Siswa dapat mengidentifikasi dampak dari pelaksanaan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru.
6. Siswa dapat merekonstruksi ulang perkembangan dalam berbagai bidang terkait dampak dari dominasi ABRI dalam bentuk makalah.

E. Materi Ajar

- a. Proses munculnya Dwifungsi ABRI (terlampir)
- b. Pelaksanaan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru (terlampir)
- c. Dampak pelaksanaan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru (terlampir)

F. Metode/Model/ Strategi Pembelajaran

- a. Metode pembelajaran:
Ceramah, diskusi, penugasan dan presentasi
- b. Model pembelajaran
Student Team Achievement Division (STAD)

- c. Strategi Pembelajaran
Saintifik

G. Langkah-langkah Pembelajaran

No	Kegiatan	Waktu
1	<p>Kegiatan Pembuka</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberi salam dan memmbuka proses belajar mengajar dengan doa. b. Mengecek kehadiran para peserta didik c. Mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi proses pembelajaran. d. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. e. Menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai f. Guru memberikan pre-test mengenai dominasi ABRI dalam struktur pemerintahan Orde Baru khususnya dalam bidang ekonomi dan politik g. Guru membagi para siswa ke dalam 5 kelompok dan memberikan topik diskusi. 	10'
2	<p>Kegiatan Inti :</p> <p>A. Mengamati (observing)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Guru mendorong siswa untuk mendapatkan informasi yang tepat dengan cara menyuruh siswa membaca dan mencari informasi dari buku yang berkaitan dengan keterlibatan golongan militer pada masa Orde Baru yang didukung oleh doktrin Dwifungsi ABRI. 2. Guru memberi waktu kepada peserta didik untuk membaca materi untuk memahami legalisasi kekuasaan yang 	

	<p>dilakukan oleh golongan militer pada masa Orde baru.</p> <p>B. Menanya (questioning)</p> <p>1. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya dan menyampaikan pendapat dari hasil pengamatan dan diskusinya.</p> <p>C. Menalar (associating)</p> <p>2. Dari pemahaman materi melalui membaca, diskusi dan bertanya, peserta didik dapat merekonstruksi legalisasi kekuasaan yang dilakukan oleh golongan militer dengan doktrin Dwifungsi ABRI-nya pada masa Orde Baru.</p> <p>3. Melalui membaca, diskusi dan bertanya peserta didik dapat mengevaluasi hal-hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama yang berkaitan dengan bidang politik, sosial dan ekonomi.</p> <p>4. Guru memberikan kesempatan bagi para siswa untuk melakukan presentasi, tanya jawab, dan jawaban siswa yang benar diberi apresiasi, sedangkan jawaban siswa yang salah diberi solusi</p> <p>D. Mencoba (experiment)</p> <p>5. Siswa diajak untuk mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan. Misalnya siswa menjawab persoalan seperti: (1) apakah keterlibatan militer dalam bidang politik dan ekonomi dapat dibenarkan? (2) bagaimanakah cara mencegah kembalinya dominasi militer ke dalam bidang politik dan ekonomi?, dst...</p> <p>E. Membentuk jejaring (Networking)</p> <p>6. Guru mempersilahkan setiap siswa antar kelompok untuk</p>	<p>70'</p>
--	---	------------

	mengkomunikasikan hasil diskusi untuk dapat menyimpulkan materi yang telah dipelajari.	
3	<p>Penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru dan siswa bersama menarik kesimpulan dari materi yang baru saja dipelajari 2. Guru bersama siswa melakukan refleksi, nilai-nilai yang didapat dari materi yang telah disampaikan. 3. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas untuk dikerjakan di rumah (PR). 4. Guru menutup kegiatan belajar mengajar dengan doa. 	10'

H. Sumber Belajar/Alat/Bahan.

a. Sumber Buku :

- Crouch, Harold, *Militer dan Politik di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1986
- Jahja Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta, Fak. Sospol UGM, 1973
- Kardiyat Wiharyanto. A, *Sejarah Indonesia.dari Proklamasi sampai Pemilu 2009*, Universitas Sanata Dharma, 2011
- Nugroho Notokusanto. *Pejuang Dan Prajurit*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985.
- Rusli Karim.M, *Peranan ABRI dalam Politik*, Haji Masagung, Jakarta, 1986

b. Alat : *White Board/Viewer*, Gambar, lembar soal.

c. Bahan : *Power point*, kertas, spidol/kapur.

I. Penilaian Hasil Belajar

1. Teknik : Tes dan Non tes
2. Bentuk :
 - a. Tes : essay dan pilihan ganda (terlampir)
 - b. Non tes : portofolio/makalah, presentasi

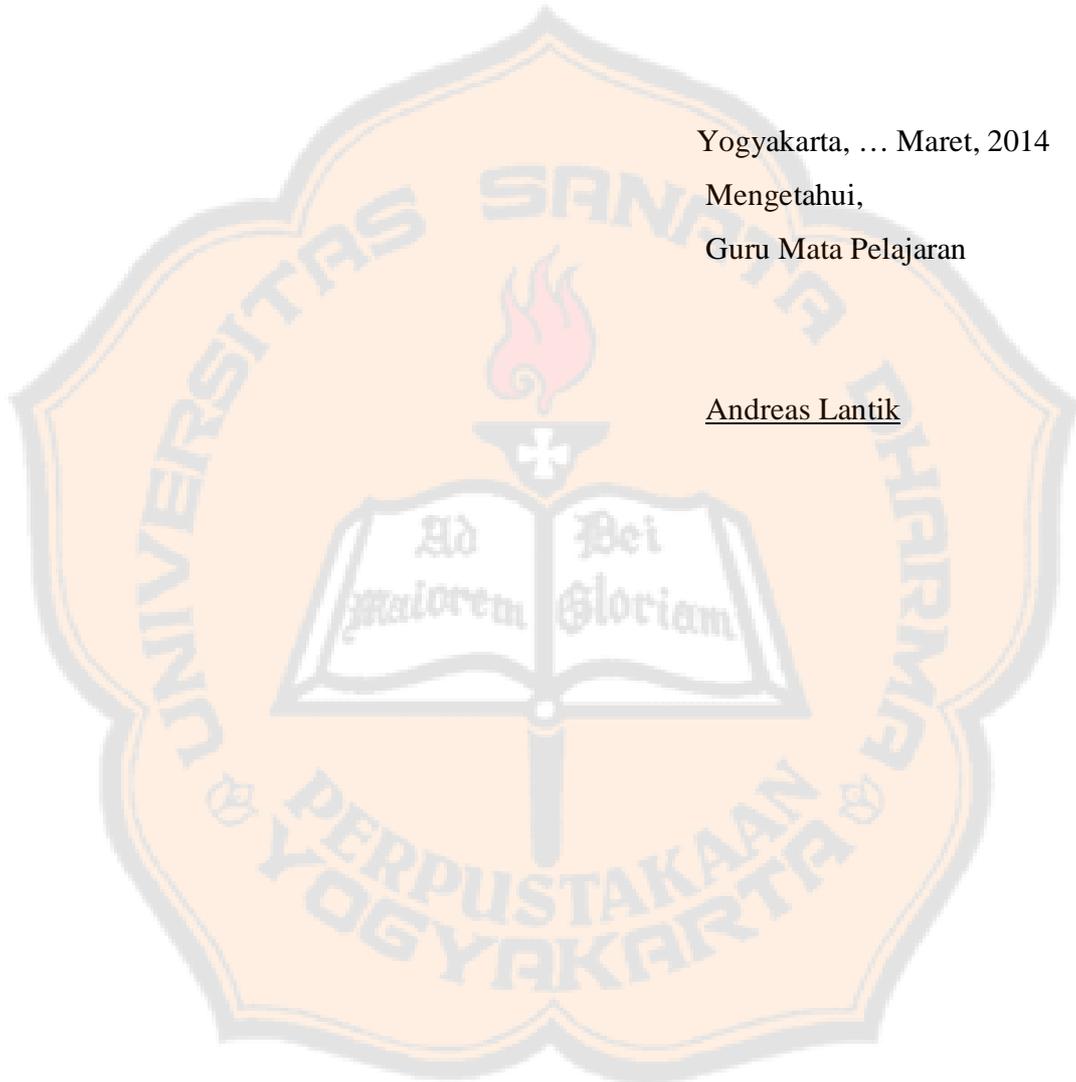
J. Instrumen Penilaian

- a. Lembar penilain sikap
- b. Lembar penilaian presentasi
- c. Lembar penilaian makalah

Yogyakarta, ... Maret, 2014

Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran

Andreas Lantik



I. LEMBAR PENILAIAN TES

Soal – soal Tes

a. Pilihan ganda

Skor per soal = 3

1. Tanggal berapakah angkatan bersenjata Indonesia dibentuk?
 - a. 17 Agustus 1945
 - b. 18 Agustus 1945
 - c. 19 Agustus 1945
 - d. 5 Oktober 1945
 - e. 5 Agustus 1945
2. Nama angkatan bersenjata yang pertama kali dibentuk adalah ...
 - a. KNI (Komite Nasional Indonesia)
 - b. BKR (Badan Keamanan Rakyat)
 - c. TKR (Tentara Keamanan Rakyat)
 - d. TRI (Tentara Republik Indonesia)
 - e. TNI (Tentara Nasional Indonesia)
3. Apakah makna dari dikeluarkannya doktrin Dwifungsi ABRI?
 - a. ABRI diperbolehkan ikut berpolitik
 - b. ABRI boleh menjadi pejabat
 - c. ABRI boleh menjalankan dua peranan dalam bidang HanKam dan politik
 - d. ABRI boleh menjalankan dua peranan dalam bidang HanKam dan sosial
 - e. ABRI memiliki peranan yang tak terbatas
4. Siapakah yang menjadi pencetus Dwifungsi ABRI?
 - a. Jenderal Ahmad Yani
 - b. Letjen Suharto
 - c. Panglima Besar Jenderal Sudirman
 - d. Mayjen A.H Nasution
 - e. Presiden Sukarno

5. Dalam pelaksanaan Dwifungsi ABRI, angkatan bersenjata manakah yang memperoleh porsi paling besar dalam jabatan di pemerintahan?
 - a. Angkatan Darat
 - b. Angkatan Laut
 - c. Angkatan Udara
 - d. Polri (Polisi Republik Indonesia)
 - e. Paspampres (Pasukan Pengaman Presiden)
6. Bagaimana cara golongan militer menekan lawan-lawan politiknya ?
 - a. Menumpas para politisi yang menentang kebijakan pemerintah
 - b. Membentuk partai tandingan
 - c. Membatasi gerakan partai politik yang berposisi terhadap pemerintah
 - d. Jawaban A dan B benar
 - e. Jawaban B dan C benar
7. Organisasi yang pertama kali dibentuk oleh golongan militer untuk menandingi kekuatan musuh-musuh politiknya adalah ...
 - a. Golkar (Golongan Karya)
 - b. Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya)
 - c. Partai Golkar
 - d. Jawaban a, b dan c benar semua
 - e. Jawaban a, b dan c salah semua
8. Dampak dari pelaksanaan Dwifungsi ABRI dalam bidang ekonomi adalah ...
 - a. Terjadinya eksploitasi sumber ekonomi untuk kepentingan Kesatuan (Angkatan Darat)
 - b. Terjadinya eksploitasi sumber ekonomi untuk kepentingan pribadi perwira militer
 - c. Terjadinya eksploitasi untuk kepentingan para birokrat di pemerintahan Orde Baru
 - d. Jawaban a dan c benar
 - e. Jawaban a dan b benar

9. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang pernah dikepalai oleh pejabat yang berasal dari kalangan militer yaitu...
 - a. Pertamina dan Bulog
 - b. Pertamina dan Pelni
 - c. Bulog dan Pelni
 - d. Indosat dan Pertamina
 - e. Garuda Indonesia dan Pertamina
10. Alasan yang menjelaskan mengapa dalam pelaksanaan Dwifungsi ABRI hanya Angkatan Darat yang di"anak emaskan" oleh Orde Baru sedangkan yang lainnya tidak, adalah, KECUALI...
 - a. Karena Angkatan Darat lebih berpengaruh dari angkatan-angkatan yang lainnya
 - b. Karena Angkatan Darat turut berjasa besar dalam melahirkan Orde Baru
 - c. Karena Angkatan Darat tidak terlibat dan tidak mendukung dalam G30S
 - d. Karena Angkatan Darat merupakan loyalis terbesar bagi Presiden Suharto
 - e. Karena Angkatan Darat merupakan almamater Presiden Suharto

b. Soal Essay

1. Jelaskan Pengertian dari Dwifungsi ABRI! (skor 10)
2. Jelaskan bentuk peranan golongan militer dalam bidang politik pada masa Orde Baru! (skor 10)
3. Apakah dengan turut terlibatnya golongan militer dalam politik maka stabilitas keamanan dalam negeri Indonesia dapat terjamin pada masa Orde baru? Jelaskan jawabanmu! (skor 20)
4. Identifikasikanlah dampak negative dan positif dari munculnya Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru dalam bidang sosial, politik dan ekonomi! Berikan lah penjelasan secukupnya! (skor 30)

c. Tugas makalah

Petunjuk penulisan:

1. Topik penulisan : dampak dari dominasi golongan militer pada masa pemerintahan Orde Baru dalam berbagai bidang seperti: politik, ekonomi, sosial dan militer.
2. Format makalah:
Bab I Pendahuluan: a.Latar Belakang, b.Rumusan Masalah, c.Tujuan Penulisan.
Bab II Pembahasan
Bab III Kesimpulan
3. Sumber penulisan minimal 3 buku dan boleh ditambah dengan sumber internet, dll.
4. Penulisan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12, dengan 2 spasi dan maksimal 10 lembar.

Keterangan Pengisian Skor

Skor maksimal Pilihan ganda = 30

Skor maksimal essay = 70

Nilai = Σ Skor Total Pilihan Ganda + Σ Skor total Essay

Keterangan nilai :

A = 80-100 : Baik Sekali

B = 70-79 : Baik

C = 60-69 : Cukup

D = <60 : Kurang

II. LEMBAR PENGAMATAN NON-TES

a. Lembar Observasi Sikap

Lembar Pengamatan Sikap

Mata pelajaran:Sejarah

Kelas/Program:XII/IPA

Kompetensi : KD 1.1 dan 2.1

NO	Nama Siswa	Observasi Sikap						Jumlah Skor	Nilai
		Sikap Religius		Keterampilan Sosial					
		Syukur	Taat Menjalankan Agama	Santun	Tanggung jawab	Kerjasama	Jujur		
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

Keterangan pengisian skor :

(4) sangat tinggi (3) Tinggi (2) Cukup (1) Kurang

$$\text{Nilai} = \frac{\sum \text{skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal (20)}} \times 100$$

Keterangan Nilai :

A = 80-100 : Baik Sekali

B = 70-79 : Baik

C = 60-69 : Cukup

D = <60 : Kurang

b. Penilaian Presentasi

Mata Pelajaran : Sejarah

Kelas/Program : XII/IPA

Kompetensi : KD 2.1, 3.1,3.2,3.3 dan 4.1

Penilaian Presentasi Hasil Diskusi Kelompok

ASPEK	1	2	3	4
<i>Pengorganisasian</i>	Peserta tidak bisa memahami presentasi karena informasi tidak disampaikan secara runtut.	Peserta mengalami kesulitan memahami presentasi karena penyampaian ide yang melompat-lompat	Informasi yang disampaikan dengan urutan logis yang dapat diikuti peserta.	Informasi disampaikan dengan urutan logis dan menarik, sehingga sangat mudah dipahami oleh peserta.
<i>Pengetahuan</i>	Siswa tidak memahami informasi dan tidak dapat menjawab pertanyaan tentang hal yang dipresentasikan	Siswa tidak menguasai informasi dan hanya mampu menjawab pertanyaan sederhana.	Siswa menjawab dengan mudah menjawab pertanyaan tetapi tidak mampu mengulas lebih jauh.	Siswa menunjukkan pengetahuan mendalam dan mampu menjawab pertanyaan dengan ulasan dan penjelasan lebih lanjut
<i>Tampilan</i>	Siswa belum menggunakan prinsip <i>Audio Visual</i> yang mendukung presentasinya.	Siswa menggunakan prinsip <i>Audio Visual</i> tidak pada setiap <i>slide</i> presentasinya.	Siswa menggunakan prinsip audio visual pada setiap slide presentasi.	Siswa menampilkan presentasi yang didukung prinsip <i>Audio Visual</i> sehingga sangat jelas
<i>Mekanisasi</i>	Siswa menampilkan lebih dari tiga kesalahan ejaan dan kesalahan tatabahasa.	Presentasi memuat tiga kesalahan ejaan dan kesalahan tatabahasa.	Presentasi memuat dua kesalahan ejaan dan tatabahasa.	Presentasi tidak memuat kesalahan ejaan dan tatabahasa
<i>Kontak Mata</i>	Siswa hanya membaca	Siswa kadang-kadang	Siswa mempertahankan	Siswa mempertahankan

	laporan dan tidak ada kontak mata dengan peserta didik lainnya.	menggunakan kontak mata, tetapi masih lebih banyak membaca slide presentasi.	kontak mata, namun masih sebatas menghafal isi slide presentasi.	kan kontak mata dengan peserta dan mengembang isi <i>slide</i> presentasi dengan bahasa yang baik.
--	---	--	--	--

Keterangan Skor :

Setiap Kolom Diisi Dengan Kriteria :

4 = Sangat tinggi

3 = Tinggi

2 = Cukup tinggi

1 = Kurang

$$\text{Nilai} = \frac{\sum \text{skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal (20)}} \times 100$$

Keterangan Nilai :

A = 80-100 : Baik Sekali

B = 70-79 : Baik

C = 60-69 : Cukup

D = <60 : Kurang

c. Penilaian Makalah Kelompok

Mata Pelajaran : Sejarah

Kelas/Peminatan : XII/IPA

Materi Pokok : Dwifungsi ABRI : Legalisasi Kekuasaan Golongan Militer dalam pemerintahan Orde Baru

Kompetensi : KD 2.1, 3.1,3.2,3.3 dan 4.1

Penilaian Tugas Makalah Kelompok

ASPEK	Kriteria dan Skor			
	4	3	2	1
Persiapan	Jika memuat topik, latar belakang dan tujuan penulisan dengan lengkap	Jika tidak memuat salah satu komponen seperti topik, latar belakang dan tujuan penulisan/ kurang lengkap	Jika tidak memuat memuat salah dua komponen seperti topik, latar belakang dan tujuan penulisan / kurang lengkap	Jika tidak memuat topik, latar belakang, dan tujuan penulisan/sangat tidak lengkap.
Pengumpulan Data (Heuristik)	Jika daftar sumber sejarah yang dicantumkan lengkap dan dipergunakan secara maksimal dalam penulisan	Jika daftar sumber sejarah yang dicantumkan lengkap namun tidak dipergunakan secara maksimal	Jika daftar sumber sejarah yang dicantumkan kurang lengkap dan tidak dipergunakan maksimal	Jika daftar sumber sejarah yang dicantumkan sangat tidak lengkap/tidak ada sama sekali.
Pengujian Data (Kritik)	Jika data yang diperoleh semua diuji secara intern dan ekstern.	Jika data yang diperoleh sebagian besar diuji secara intern dan ekstern	Jika data yang diperoleh hanya sebagian kecil yang diuji secara intern dan ekstern.	Jika data yang diperoleh langsung dipakai tanpa diuji.
Penafsiran Data (Interpretasi)	Jika penafsiran dilakukan terhadap semua data	Jika penafsiran dilakukan terhadap sebagian besar	Jika penafsiran dilakukan terhadap sebagian kecil	Jika penafsiran dilakukan terhadap sebagian kecil pada data yang

	baik yang tersurat dan tersirat.	data baik yang tersurat dan tersirat	data yang tersurat dan tersirat.	tersurat sedangkan data yang tersirat tidak samasekali.
Sistematika Penulisan	Jika sistematika penulisan benar, memuat simpulan, dan bahasa komunikatif.	Jika sistematika penulisan benar, memuat simpulan, namun bahasa kurang komunikatif.	Jika penulisan sistematis, tapi bahasa kurang komunikatif, dan tidak memuat simpulan.	Jika penulisan kurang sistematis, bahasa kurang komunikatif dan tidak memuat simpulan.

Keterangan Skor :

Setiap Kolom Diisi Dengan Kriteria :

4 = Sangat tinggi

3 = Tinggi

2 = Cukup tinggi

1 = Kurang

$$\text{Nilai} = \frac{\sum \text{skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal (20)}} \times 100$$

Keterangan Nilai :

A = 80-100 : Baik Sekali

B = 70-79 : Baik

C = 60-69 : Cukup

D = <60 : Kurang

Lampiran Materi Pembelajaran:

Dwifungsi ABRI:

Legalisasi Kekuasaan Golongan Militer Dalam Pemerintahan Orde Baru

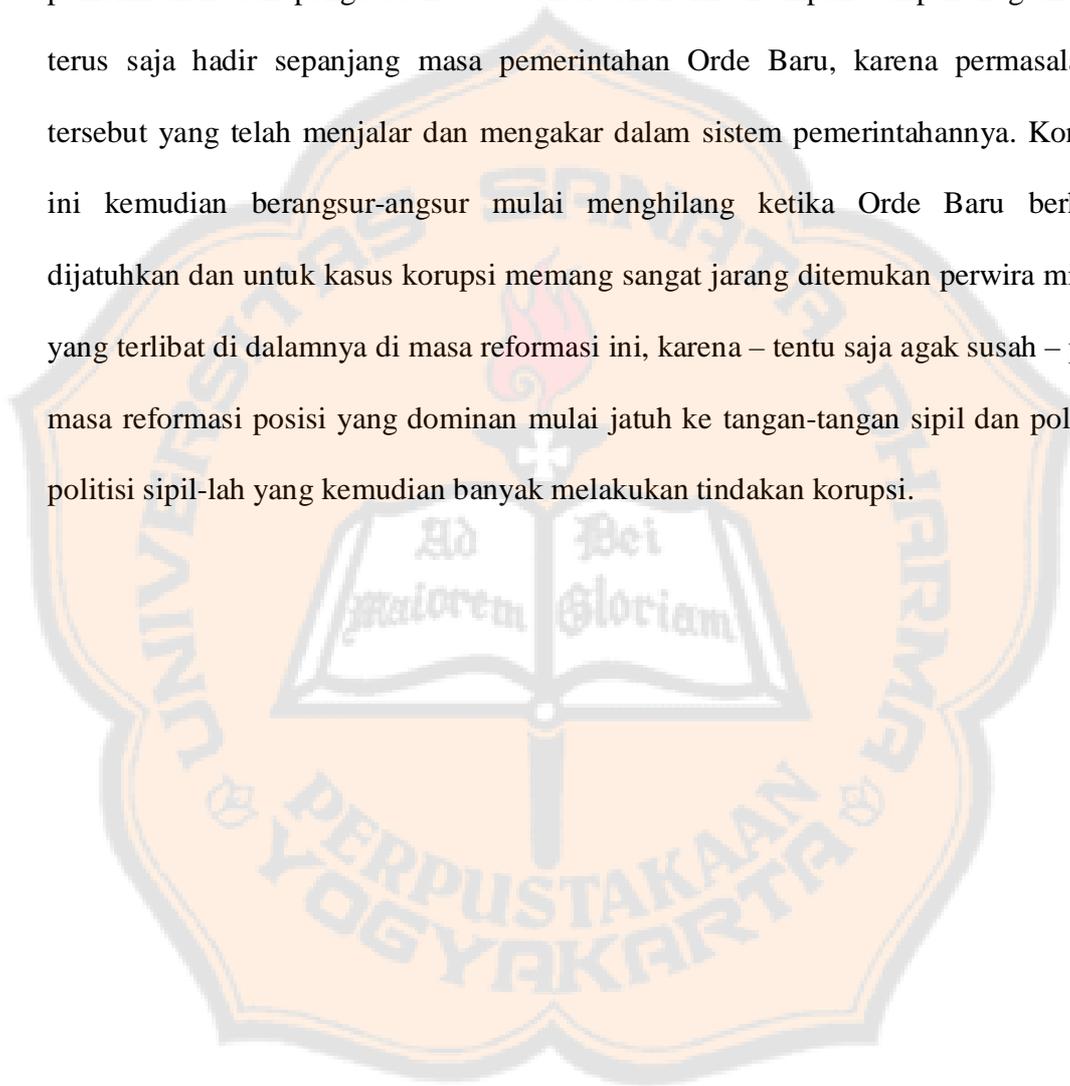
Proses munculnya Dwifungsi ABRI dalam pemerintahan Orde Baru merupakan hal yang lumrah dan memang sudah sewajarnya demikian. Hal ini tidak terlepas dari background yang dimiliki oleh militer itu sendiri, di mana sejak masa-masa awal kemerdekaan mereka sudah terbiasa dengan tugas-tugas yang tidak hanya terkait dengan fungsi Hankam, namun sudah terbiasa juga dengan tugas-tugas sipil. Dengan kata lain, militer memang sudah sejak dari awal lahirnya sudah “mendwifungsikan” dirinya. Kondisi ini juga yang terus berlanjut ketika Orde Baru mulai menggusur dominasi Orde Lama, yang mana dalam prosesnya sangat mengandalkan kekuatan-kekuatan militer, terutama kekuatan dari Angkatan Darat. Relasi yang sedemikian rupa membuat pemerintahan Orde Baru dengan militer yang didominasi oleh Angkatan Darat membuat keduanya dikenal sebagai duet maut yang selalu berdampingan dalam menghadapi musuh-musuh politiknya, bahkan militer merupakan tangan kanan dan merupakan tempat bagi pemimpin Orde Baru pada saat itu untuk meletakkan kepercayaannya, sehingga tidak akan aneh apabila ditemukan banyak sekali perwira-perwira yang diangkat menjadi menteri yang mengurus departemen-departemen terpenting di kabinet.

Peranan militer yang sangat vital dan berkedok dwifungsi ABRI-nya, merupakan senjata terampuh yang dimiliki oleh Orde Baru dalam memenangkan dominasi politik atas partai-partai yang dianggap menghalangi “pembangunan

nasional” pada masa itu. Selain dalam bidang politik, dominasi dalam sektor-sektor perekonomian juga menjadi milik para perwira militer yang ditempatkan untuk memimpin badan-badan yang dimiliki oleh negara. Dalam menjalankan fungsi politiknya, kalangan militer bahkan membuat sebuah terobosan yang sangat radikal, yakni dengan mendirikan Sekber Golkar yang kemudian menjadi partai Golkar. Pendirian partai ini ternyata memang sangat tepat dan menguntungkan rezim Orde Baru, karena melalui partai inilah kepemimpinan Suharto sanggup bertahan selama lebih kurang 30 tahun. Dalam menjalankan fungsi ekonomi kalangan militer juga mendapatkan berbagai keuntungan, diantaranya; mampu menambah pendanaan bagi operasional angkatan bersenjata (dana APBN dirasa masih sangat kurang), “pengemplangan” dana dari sektor-sektor ekonomi milik negara ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga terlihat oleh publik bahwa anggaran belanja negara untuk bidang Hankam telah dilaksanakan dengan begitu efektif dan sekaligus memberikan citra positif bagi pemerintah sendiri.

Keterlibatan militer yang didukung oleh doktrin Dwifungsi ABRI-nya dalam bidang sosial-politik dan ekonomi, membawa banyak dampak buruk yang tidak hanya merugikan negara dan bangsa, tetapi juga berdampak negatif bagi tubuh angkatan bersenjata. Dampak yang terjadi dalam bidang sosial-politik misalnya, dibatasinya pergerakan partai-partai politik dalam partisipasi pemerintahan, dalam bidang sosial, terjadi kemerosotan moral para pejabat militer yang banyak melakukan korupsi ketika diberi kepercayaan oleh Orde Baru untuk menguasai sektor ekonomi, sedangkan dampak yang paling terakhir adalah bagi suasana dalam tubuh angkatan

bersenjata yang mengalami banyak persaingan dan perebutan pengaruh untuk bisa mendapatkan kepercayaan Suharto agar bisa ditempatkan dalam jabatan pemerintahan dan penguasaan atas sektor ekonomi. Dampak-dampak negatif tadi terus saja hadir sepanjang masa pemerintahan Orde Baru, karena permasalahan tersebut yang telah menjalar dan mengakar dalam sistem pemerintahannya. Kondisi ini kemudian berangsur-angsur mulai menghilang ketika Orde Baru berhasil dijatuhkan dan untuk kasus korupsi memang sangat jarang ditemukan perwira militer yang terlibat di dalamnya di masa reformasi ini, karena – tentu saja agak susah – pada masa reformasi posisi yang dominan mulai jatuh ke tangan-tangan sipil dan politisi-politisi sipil-lah yang kemudian banyak melakukan tindakan korupsi.



KUNCI JAWABAN

- Soal Pilihan Ganda

1. C

2. B

3. C

4. D

5. A

6. E

7. B

8. E

9. A

10. E

- Soal Essay

1. Dwifungsi ABRI adalah doktrin yang dicetuskan untuk membenarkan keterlibatan militer dalam bidang politik selain peranan utamanya bidang pertahanan dan keamanan.
2. Pada masa Orde Baru, golongan militer memegang dan menjalankan peranan yang sangat penting dalam bidang politik. Tugas yang diemban oleh golongan militer berupa peran sebagai tembok pelindung bagi pemerintah Orde Baru dari serangan yang dilakukan oleh lawan-lawan politik/pihak partai oposisi yang dianggap

mengganggu stabilitas pemerintahan dalam negeri. Peran golongan militer dalam bidang politik semakin dominan ketika didirikannya Sekber Golkar (sekretariat bersama Golkar) yang kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi Partai Golkar dan menjadi mitra utama bagi pemerintah Orde baru dalam mempertahankan dominasi politik di Indonesia pada masa itu.

3. Keterlibatan militer dalam bidang politik memang berdampak langsung pada tingkat stabilitas keamanan dalam negeri. Secara garis besar apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam bidang politik, maka keterlibatan militer dalam politik turut membantu dan menjamin kestabilan keamanan dalam skala nasional, karena konflik politik yang biasanya turut menyeret kalangan sipil pada masa Orde Lama, berkurang drastis di masa Orde Baru. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang kelompok yang ber-oposisi atau kontra dengan pemerintahan Orde Baru, maka keterlibatan militer dalam bidang politik tidak akan pernah bisa menjamin keamanan dalam negeri karena kehadiran militer dalam politik menghadirkan ancaman tersendiri bagi kelompok tersebut, dan bahkan dengan terlibatnya militer dalam bidang politik turut membentuk sebuah pemerintahan bergaya diktator yang akan menumpas setiap lawan-lawan politik dan tentu saja hal ini justru akan melahirkan terror ketimbang keamanan.

4. I. Dampak negative munculnya Dwifungsi ABRI

a. Dalam bidang sosial yaitu: korupsi secara besar-besaran yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat yang berasal dari kalangan militer demi kepentingan pribadi dan kesatuan.

b. Dalam bidang politik yaitu: munculnya pengekan dan pembatasan gerak bagi partai-partai yang berposisi terhadap pemerintah Orde Baru. Hal ini tidak terlepas dari peranan golongan militer yang merupakan mitra utama pemerintah Orba dalam bidang politik. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya pembentukan partai Golkar (Golongan Karya) yang ditujukan untuk menandingi partai-partai yang menjadi lawan politik pemerintah.

c. Dalam bidang ekonomi yaitu: munculnya dominasi kalangan militer atas sumber-sumber pemasukan ekonomi yang bersifat utama bagi pemerintah. Dominasi militer atas sumber tersebut membuat pemasukan bagi Negara menjadi tidak optimal karena sebagian besar hasilnya justru dipergunakan untuk kepentingan kesatuan (ABRI) dan untuk kepentingan pribadi para perwira militer.